

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT NU
LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
ANIK NUZULUR ROHMAH

NIM : E20193117

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2023**

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT NU
LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

ANIK NUZULUR ROHMAH

NIM: E20193117

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Nikmatul Masruroh, S.H. I., M. E. I

NIP. 19820922 200901 2 005

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT NU
LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 05 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag
NIP.197111142003121002



Suprianik, S.E., M.Si
NIP.198404162019032008

Anggota:

1. Dr. Moh. Haris Balady, M.M
2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonoi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Ali Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA
NIP.196808072000031001

MOTTO

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ بِإِوَالِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa.(QS. Az-Zumar:[23]. 33)”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, 23:33.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan iringan doa kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, sebagai tanda terimakasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu saya tercinta, Ibu Anisawati Wiandani yang secara penuh senantiasa mendoakan dan memberikan kesempatan saya dalam menempuh jenjang pendidikan S1.
2. Ibu Anik Karomah, Mbak Muhabbah, Mas Ahmad Muzakki dan keluarga besar KSPPS BMT NU Lumajang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan yang tidak saya dapatkan dalam perkuliahan.
3. Nila Himah Muddah, Ela Nur Afifah, Yeni Alfia Wardah, Izza Khoirotun Nisa, Hamdan Maulana Asror dan semua teman-teman akuntansi syariah 3 angkatan 2019 yang sudah menemani dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terakhir, tugas akhir ini sebagai bentuk dedikasi terakhir saya kepada kampus tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang akan datang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata (S-1) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.

6. Ibu Anik Karomah, Mbak Muhabbah, Mas Ahmad Muzakki, dan seluruh keluarga besar KSPPS BMT NU Lumajang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan yang tidak penulis dapatkan dalam perkuliahan.
7. Dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung, sejak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun di masa mendatang. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta bagi pembaca.



Jember, 4 September 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penulis
J E M B E R

ABSTRAK

Anik Nuzulur Rohmah, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I., 2023: *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang.*

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan, dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan maupun untuk mengelola simpanan atau tabungan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang? (2) Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang? (3) Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang (2) Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang (3) Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang ini melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adanya penghargaan yang diberikan oleh PWNU Jawa Timur dalam kategori BMT membuktikan bahwa pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang sudah diakui oleh publik. Meskipun, masih terjadi rangkap jabatan di KSPPS BMT NU Lumajang pada bagian *customer service (cs)* yang merangkap menjadi *funding officer (fo)*. 2) Dilihat dari indikator penerapan transparansi, KSPPS BMT NU Lumajang sudah baik. Namun, pada penerapan prinsip transparansi KSPPS BMT NU Lumajang masih belum maksimal karena belum memiliki *website* khusus dan pemanfaatan media sosial yang masih kurang. 3) Penerapan prinsip akuntabilitas pada KSPPS BMT NU Lumajang sudah terlaksana. Namun, laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban yang dimiliki KSPPS BMT NU Lumajang belum bisa dipertanggungjawabkan kewajarannya karena belum pernah di audit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	26
1. Transparansi.....	26
2. Akuntabilitas.....	32
3. Pengelolaan.....	35

4. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subjek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data	54
G. Tahap – Tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian data dan Analisis	66
1. Pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang	66
2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang	82
3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang	109
C. Pembahasan Temuan	132
1. Pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang	132
2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang	134
3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang	137
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2. Surat Keterangan Lulus Plagiasi

Lampiran 3. Surat Selesai Bimbingan

Lampiran 4. Matrik Penelitian

Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 6. Surat Selesai Penelitian

Lampiran 7. Pedoman Wawancara

Lampiran 8. Jurnal Penelitian

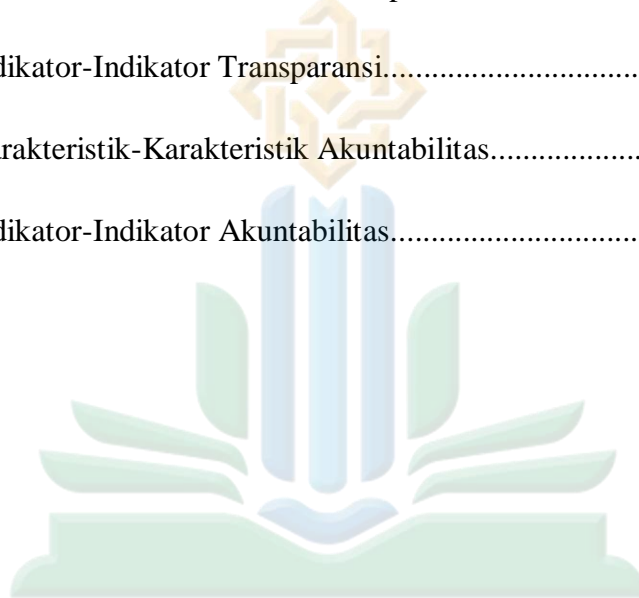
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 10. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Mapping Penelitian Terdahulu.....	16
4.1	Tahapan-Tahapan Pengelolaan.....	133
4.2	Karakteristik-Karakteristik Transparansi.....	135
4.3	Indikator-Indikator Transparansi.....	136
4.4	Karakteristik-Karakteristik Akuntabilitas.....	138
4.5	Indikator-Indikator Akuntabilitas.....	139



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
1.1	Grafik Jumlah Koperasi Tahun 2021.....	2
4.1	Bagan Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Lumajang.....	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan maupun untuk mengelola simpanan atau tabungan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).²

Perbedaan kedua jenis lembaga keuangan ini terletak pada penerapan prinsip-prinsip syariahnya. Pada Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK), prinsip syariah tidak dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya, artinya bisa saja terjadi pelanggaran terhadap ajaran agama Islam seperti terjadinya praktik riba. Sedangkan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), prinsip syariah dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya untuk menghindari praktik riba, *gharar*, dan *maysir*. Persamaannya adalah menjadikan pelaku-pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai target utama pemasaran. Salah satu bentuk LKMS, yakni Koperasi Syariah.³

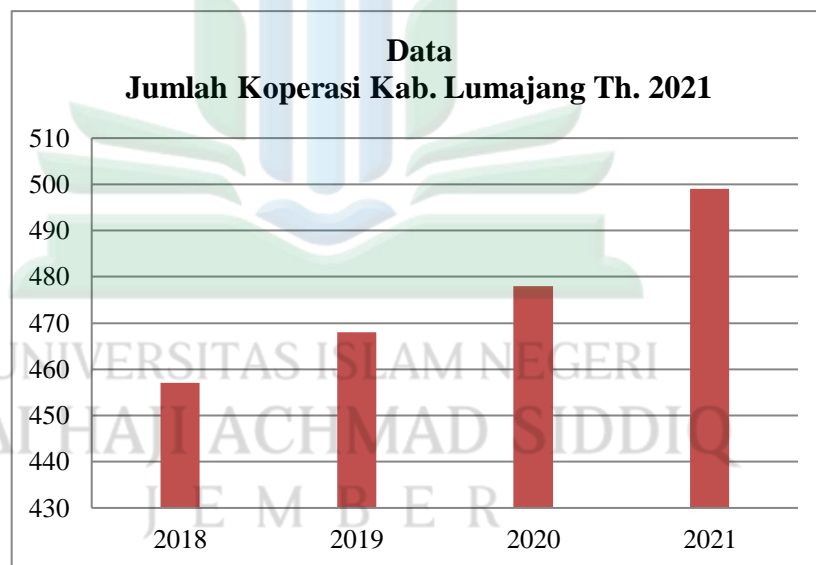
² Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

³ Elisa Permatasari, "Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan pada Koperasi Syariah (Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu)" (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 52.

Dari perspektif syariah, kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah tidak berbeda dengan yang lain. Besarnya kegiatan usaha sangat dipengaruhi oleh segmentasi, misalnya pada lembaga keuangan syariah perbankan, bank umum syariah menghimpun dan menyalurkan dananya dalam jumlah besar, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam jumlah menengah, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam jumlah kecil dan mikro.⁴

Perkembangan koperasi di Lumajang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Bisa dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.1 Grafik jumlah koperasi tahun 2021



Sumber: Data dinas koperasi Kabupaten Lumajang

Dari grafik di atas bisa diketahui bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah koperasi sebanyak 457, pada tahun 2019 jumlah koperasi mengalami peningkatan sehingga koperasi berjumlah 468, pada tahun 2020 juga mengalami

⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: IAI, 2019), 10.

peningkatan sehingga jumlah koperasi menjadi 478, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sehingga jumlah koperasi sebanyak 499 koperasi.⁵

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Wibisono dijelaskan bahwa keberadaan koperasi yang bergerak di bidang usaha ekonomi sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Lumajang, terutama untuk mensejahterakan rakyatnya dan khususnya bagi anggota koperasi. Para anggota koperasi dapat menjalankan usaha ekonomi sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan dari hasil usaha ekonomi tersebut bisa memperoleh keuntungan usaha yang dapat mensejahterakan para anggota koperasi.⁶

Menurut Sinta Bela Ramadhani pada penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Lumajang, pemerintah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya melalui usaha ekonomi. Selaras dengan Peraturan Bupati No.93 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang, Pasal 24 Ayat 1 dan 2 mengenai penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro tentang bantuan permodalan dan pelatihan keterampilan dan sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 tahun

⁵ Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, "Data Jumlah Koperasi di Lumajang tahun 2021," Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, diakses 27 Januari 2023,

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/data?kategori=5&tahun=2022&judul=data+jumlah+koperasi%0D%0A>.

⁶ Yusuf Wibisono, "Penerapan Manajemen Resiko pada Pengelolaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)," *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage* 3, no. 2 (2019): 120.

2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lumajang.⁷

Dari sini bisa disimpulkan bahwa keberadaan koperasi saat ini sangat berpengaruh dalam mendukung permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Lumajang dan tentunya terjadi persaingan yang cukup kuat antar koperasi dalam menarik minat pelaku-pelaku UMKM, tak terkecuali Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Lumajang.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang penyaluran pinjaman (pembiayaan) dan tabungan (simpanan) untuk menunjang permodalan sektor UMKM. Pembangunan BMT bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan syariat Islam. Perkembangan BMT saat ini sangatlah pesat sehingga menyebabkan membesarnya tingkat saing dalam pengelolaan koperasi. Keberadaan BMT ini sangat diperlukan karena dapat berdampak langsung pada masyarakat lapisan bawah dan lebih dekat dengan masyarakat.⁸

Tercatat ada beberapa BMT di Kabupaten Lumajang, seperti BMT NU Lumajang, BMT UGT Sidogiri, BMT Al-Ikhlash, BMT UGT Nusantara, dan BMT Maslahah. Perkembangan BMT-BMT ini cukup baik, terbukti dengan terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) di setiap akhir periode. Namun,

⁷ Sinta Bela Ramadhani, "Good Governance Poverty Alleviation Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro (Studi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 6-7.

⁸ Siti Muslimah, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 2.

terjadi persaingan dalam mendapatkan dan mempertahankan nasabah yang sudah ada di antara Lembaga Keuangan Syariah.⁹

Kemajuan sebuah lembaga ditentukan oleh pengelola yang ada didalamnya. Seperti yang masyarakat ketahui bahwa BMT ini baru berdiri kurang lebih 2,5 tahun yang lalu dan sekarang sudah memiliki anggota nasabah kurang lebih sebanyak 1.760 anggota nasabah. Tentunya hal ini menjadi suatu prestasi bagi KSPPS BMT NU Lumajang karena bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Saat ini KSPPS BMT NU Lumajang sudah memiliki 4 kantor cabang yakni BMT NU cabang Jatiroto, Pasirian, Pasrujambe dan Senduro. Pada saat RAT telah dijelaskan bahwa target BMT NU Lumajang setiap tahunnya bisa memiliki 2 kantor cabang baru. Bukan hal mudah bagi suatu lembaga untuk memperluas jangkauannya dalam melayani masyarakat hingga bisa membuka beberapa cabang baru, hal itu memerlukan keseriusan seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan operasional lembaga tersebut.¹⁰

BMT NU Lumajang menawarkan beberapa jasa simpanan dan pembiayaan. Dalam laporan perkembangan keuangan BMT NU Lumajang, dari bulan Juni-Desember 2022 stagnan, artinya tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan jumlah simpanan. Sedangkan pada pembiayaan antara bulan Juni-Desember 2022 terjadi kenaikan jumlah pinjaman dibandingkan

⁹ Achmad Toyyibur Rohman, "Penerapan Marketing Mix dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah BMT Nuansa Umat (NU) Jawa Timur Randuagung Kabupaten Lumajang" (Tesis, IAIN Jember, 2020), 6.

¹⁰ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 25 November 2022.

dengan bulan-bulan sebelumnya. Pembiayaan yang paling banyak menarik minat masyarakat ialah pembiayaan murabahah.¹¹

Transparansi diartikan sebagai suatu prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi adalah suatu prinsip dalam meningkatkan kepercayaan antar pengelola dan pengurus koperasi dengan anggota melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan untuk mendapatkan informasi. Prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh BMT NU Lumajang bisa terlihat pada transparansi kepada pengurus. Jadi, teller atau bagian pelayanan harus rutin *update* informasi kepada pengurus terkait laporan transaksi harian dan laba rugi bulanan setiap hari di akhir jam kerja.¹²

Prinsip dasar yang digunakan untuk meningkatkan kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban bagi organ koperasi sebagai pengurus atau pengambil keputusan sehingga kegiatan operasional koperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam hal mewujudkan kesejahteraan anggotanya merupakan definisi dari akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas pada BMT NU Lumajang ini ialah penyajian laporan keuangan yang disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara periodik mengenai pengelolaan sumber daya yang ada di BMT NU Lumajang.¹³

Dalam menerapkan prinsip ini, BMT NU Lumajang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, BMT NU

¹¹ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 25 November 2022.

¹² Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Februari 2023.

¹³ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Februari 2023.

Lumajang harus dikelola secara baik dan sehat dengan memperhatikan kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang?
3. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang

¹⁴ Usnan, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah),” *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 5, no. 1 (Februari, 2019): 85.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini memiliki manfaat yang dibagi dalam dua kategori yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat bermanfaat bagi pembaca.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis: menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang.
 - b. Bagi akademik: dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan wawasan khususnya untuk Mahasiswa FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 - c. Bagi KSPPS BMT NU Lumajang
 - 1) Dapat digunakan sebagai evaluasi instansi, apakah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah dijalankan dengan baik atau belum.
 - 2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kekurangan yang masih ada di instansi tersebut.

E. Definisi Istilah

1. Prinsip Transparansi

Dalam melaksanakan operasional koperasi pasti dibutuhkan objektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaannya untuk menghindari

kecurangan. Pengelola dan pengurus koperasi wajib menyampaikan informasi secara transparan atas semua aktivitas yang telah dilakukan oleh koperasi dan harus memberikan informasi yang akurat kepada anggotanya. Informasi yang disampaikan berupa informasi mengenai pengelolaan sumber daya yang ada di dalam koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁵

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi baik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ataupun informasi lain kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Artinya, informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan tersedia secara cuma-cuma dan mudah dalam mengaksesnya.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa transparansi adalah ketersediaan informasi seluruh kegiatan operasional ataupun keadaan suatu unit usaha yang dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti *stakeholder*.

2. Prinsip Akuntabilitas

Selain prinsip transparansi, ada juga prinsip lain yang tak kalah penting yaitu prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional koperasi atas apa yang telah di amanahkan kepadanya. Salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas yaitu dengan

¹⁵ Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi dan Governance* 1, no. 1 (Juli, 2020): 59.

dilaksanakannya audit pada sebuah koperasi. Dengan akuntabilitas, pengelola koperasi dituntut agar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang telah diamanahkan.¹⁶

Akuntabilitas merupakan alat perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan tujuan suatu organisasi melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena dana yang dikelola berasal dari dana masyarakat.¹⁷

Dapat disimpulkan, akuntabilitas ialah pertanggungjawaban atas tugas yang telah diamanahkan kepada masing-masing bagian suatu organisasi dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

3. Pengelolaan

Secara etimologi manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dalam bahasa latin ada kata yang memiliki definisi hampir sama, yakni “*manus*” yang artinya tangan atau menangani.¹⁸ Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama

¹⁶ Ahmad Hijri Alfian dan Diah Sekar Arum, “Akuntabilitas sebagai penerapan Good Corporate Governance yang Mengurangi Potensi Kecurangan pada Koperasi Syariah,” *Jurnal Stie Semarang* 15, no. 2 (Juni, 2023):180.

¹⁷ Usnan, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah),” *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 5, no. 1 (Februari, 2019): 85.

¹⁸ M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.

para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.¹⁹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan terhadap SDM untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

4. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang unik dan menjadi ciri khas dari Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ialah koperasi yang menerima tabungan (simpanan) dan menyediakan pinjaman (pembiayaan) kepada anggotanya.²⁰ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang mengutamakan usaha simpan pinjam yang pada prinsipnya memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan sesuai dengan syariat Islam.²¹

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah sebuah koperasi yang kegiatan operasionalnya untuk menghimpun (simpanan) dan menyalurkan (pembiayaan) dana kepada masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

¹⁹ Ali Sadikin, Isra Misra & Muhammad Sholeh Hudin, *Pengantar Manajemen dan Bisnis* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 3.

²⁰ Bambang Agus Sumantri dan Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan, Teori dan Praktek* (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), 2.

²¹ Kasih Purwantini, *Akuntansi Koperasi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), 7.

Maksud dari judul proposal ini adalah penerapan prinsip keterbukaan informasi terkait semua kegiatan operasional (*transparancy*) dan pertanggungjawaban atas tugas yang diamanahkan kepada seseorang (*accountibility*) dalam mengatur sumber daya yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang.

5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi yang dimulai dengan bab pendahuluan sampai bab penutup merupakan topik pembahasan sistematika. Format penulisan sistematika pembahasan berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²² Uraian sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

²² Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAN Jember Pers, 2019), 91.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Imroatus Soliha (2021) dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip GCG di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikannya. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo dan pada penerapan GCG ini BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo mengalami beberapa kendala yakni faktor internal. Kendala faktor internal yang dialami, seperti pasang surutnya kedisiplinan karyawan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terlihat pada jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dan metode keabsahan data yang digunakan, yakni triangulasi sumber. Perbedaannya, yaitu pada penelitian ini membahas

tentang kelima prinsip GCG yang meliputi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.²³

2. Idris Abas Ibrahim (2021) dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Cirebon”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip GCG pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, penerapan prinsip GCG di KSP Kabupaten Cirebon adalah sebuah keadaan yang wajib dijalankan dan diberlakukan di Kabupaten Cirebon. *Kedua*, perkoperasian di Cirebon belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip GCG. *Ketiga*, prinsip GCG harus menjadi bagian dari perkoperasian khususnya di Kabupaten Cirebon dan umumnya bagi perkoperasian di Indonesia. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terdapat pada jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya, yakni penelitian ini tidak hanya membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas, namun juga membahas prinsip pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

24

3. Siti Muslimah (2021) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa”. Tujuan penelitian ini

²³ Imroatus Sholiha, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo,” *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 15, no. 1 (Juni, 2021): 161-180.

²⁴ Idris Abas Ibrahim, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Cirebon,” *Jurnal of Law* 1, no. 2 (April, 2021): 56-62.

adalah untuk mengetahui penerapan GCG dan Manajemen Risiko pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa. Hasil penelitian pada penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh gambaran bahwasannya penerapan *Good Corporate Goernance* pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa sudah diterapkan berdasarkan undang-undang dan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Diwujudkan dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan, yakni pada teknik pengumpulan datanya yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya, yaitu tidak hanya fokus meneliti pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas namun keseluruhan prinsip GCG dan juga meneliti mengenai penerapan manajemen risiko.²⁵

4. Juliana Nasution, dkk. (2022) dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Penerapan Good Corporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan penerapan GCG di sektor UKM Kota Medan, mengidentifikasi aspek regulasi yang perlu diubah, hingga menganalisis praktik tata kelola perusahaan yang baik di Kota Medan. Hasil penelitian ini adalah tingkat penerapan *Good Corporate Governance* pada Usaha

²⁵ Siti Muslimah, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 1-77.

Kecil dan Menengah di Kota Medan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesadaran para pelaku UKM terhadap pentingnya menjalankan GCG, peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menerapkan GCG, pengetahuan dan keterampilan mereka tentang cara menerapkan dan akses mereka ke dana dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melakukannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan, yaitu termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya, yakni membahas mengenai penerapan prinsip GCG yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan.²⁶

5. Sevi Rahmawati (2022) dengan judul penelitian “Analisis Good Cooperative Governance pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau dan mengevaluasi bagaimana tata kelola yang baik pada Koperasi Mina Pananjung Lestari dan sejauh mana prinsip GCG diterapkan. Hasil penelitiannya, yaitu kelima prinsip GCG telah berhasil diterapkan dengan sangat baik, meskipun begitu masih terdapat beberapa indikator yang belum diterapkan dengan maksimal. Koperasi Mina Pananjung Lestari tentunya menemui beberapa kendala dalam mengimplementasikan kelima prinsip GCG tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan, yaitu jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan

²⁶ Juliana Nasution, dkk., “Analisis Tingkat Penerapan Good Corporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2022): 841-850.

pendekatan kualitatif dan juga teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya, yaitu penelitian ini membahas mengenai penerapan kelima prinsip GCG pada Koperasi Mina Pananjung Lestari dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplentasikannya.²⁷

6. Elisa Permatasari (2022) dengan judul penelitian “Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan pada Koperasi Syariah (Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja karyawan pada Koperasi Syariah (Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu). Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan GCG pada Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu sudah diterapkan dengan baik. Penerapan GCG ini berlangsung hingga saat ini oleh kantor pusat hingga kantor-kantor cabang. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan, yaitu jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya,

²⁷ Sevi Rahmawati, “Analisis Good Cooperative Governance pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran” (Skripsi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022), 1-79.

yaitu pada penelitian ini membahas mengenai penerapan GCG untuk meningkatkan kinerja karyawan.²⁸

7. Nining Supianti (2022) dengan judul “Penerapan Good Corporate Governane dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja karyawan dan dampaknya pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan GCG pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah, terutama penerapan kepada karyawannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan, yaitu jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya, yaitu penelitian ini membahas mengenai kelima prinsip GCG dan juga dampak penerapannya terhadap KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.²⁹
8. Rezki Astuti Soraya (2022) dengan judul “Analisis kualitas penerapan Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualitas

²⁸ Elisa Permatasari, “Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan pada Koperasi Syariah (Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu)” (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 1-126.

²⁹ Nining Supianti, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur” (Skripsi, UIN Mataram, 2022), 1-95.

penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar meskipun berada pada kualitas baik, masih menunjukkan kelemahan yang harus di perbaiki. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan, yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkan perbedaannya, yakni penelitian ini tidak hanya membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun membahas penerapan prinsip-prinsip GCG yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.³⁰

9. Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada seluruh desa di Kecamatan Kadipaten)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka artinya semakin transparan pengelolaan APBDes maka pengelolaan APBDes akan semakin baik. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, artinya semakin akuntabel

³⁰ Rezki Astuti Soraya, “Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 1 (Januari, 2022): 1-6.

pengelolaan APBDes akan semakin baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah membahas prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan perbedaannya, yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik kuesioner dalam pengumpulan datanya.³¹

10. Dimas Aufa Moerrin dan Hero Priono (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Karyawan”. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pegawai pada PT. Jasamitra Propertindo di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini, yaitu akuntabilitas dan transparansi secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan, yakni membahas mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan perbedaannya, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan alat *Smart Partial Least Square (PLS) 3.0*.³²

Guna memberikan penjelasan lebih ringkas mengenai penelitian terdahulu di atas, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

³¹ Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten),” *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2022): 703-713.

³² Dimas Aufa Moerrin & Hero Priono, “Pengaruh Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pegawai,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 11 (Juni 2022): 57-68.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Imroatus Sholihah, 2021	Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo.	Membahas tentang implementasi kelima prinsip GCG yang meliputi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.	Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan metode keabsahan data yang digunakan, yakni triangulasi sumber.
2.	Idris Abas, 2021	Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Cirebon.	Tidak hanya membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas, namun juga membahas prinsip pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.	Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
3.	Siti Muslimah, 2021	Analisis Penerapan Good Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton	Tidak hanya fokus meneliti pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas namun keseluruhan prinsip GCG dan juga meneliti mengenai penerapan manajemen risiko.	Teknik pengumpulan datanya yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Kecamatan Pondok Kelapa.		
4.	Juliana Nasution, dkk., 2022	Analisis Tingkat Penerapan Good Corporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan.	Membahas mengenai penerapan prinsip GCG yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan.	Termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif.
5.	Sevi Rahmawati, 2022	Analisis Good Cooperative Governance pada Koperasi Mina Tanjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.	Membahas tentang penerapan kelima prinsip GCG pada Koperasi Mina Pananjung Lestari dan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplimentasikan nya.	Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif dan juga teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
6.	Elisa Permatasari, 2022	Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan pada Koperasi Syariah (Studi pada Lembaga Keuangan Mikro	Pada penelitian ini membahas mengenai penerapan GCG untuk meningkatkan kinerja karyawan.	Jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu).		
7.	Nining Supianti, 2022	Penerapan Good Corporate Governane dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.	Penelitian ini membahas mengenai penerapan kelima prinsip GCG dan juga dampak penerapannya terhadap KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.	Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
8.	Rezki Astuti Soraya, 2022	Analisis kualitas penerapan Good Corporate Analisis kualitas penerapan Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.	Tidak hanya membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan Tidak hanya membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun membahas penerapan prinsip-prinsip GCG yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.	Menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya.
9.	Melia Widah Rahmani dan	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas	Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik kuesioner	Membahas prinsip transparansi dan akuntabilitas.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Engkun Kurnadi, 2022	terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada seluruh desa di Kecamatan Kadipaten).Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Karyawan	dalam pengumpulan datanya. Jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan alat <i>Smart Partial Least Square (PLS) 3.0</i> .	Membahas prinsip transparansi dan akuntabilitas.
10.	Dimas Aufa Moerrin dan Hero Priono, 2022	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Karyawan	Jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan alat <i>Smart Partial Least Square (PLS) 3.0</i> .	Membahas prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sumber: diolah oleh penulis

Penelitian ini berbeda dengan 10 penelitian terdahulu di atas karena pada penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang. Dalam menguji kredibilitas data yang telah terkumpul dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

B. Kajian Teori

1. Teori Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvius*) atau dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi maupun pemerintahan dapat menumbuhkan keadilan. Oleh karena itu, transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*.³³

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai suatu organisasi. Dalam kaitannya dengan Islam, konsep transparansi atau keterbukaan informasi telah dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah: 119 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”³⁴

Dari tafsir QS. At-Taubah: 119 di atas apabila dikaitkan dengan prinsip transparansi, maka nilai yang terkandung di dalamnya adalah shiddiq. Shiddiq berarti jujur, artinya apa yang disampaikan

³³ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: ALFABETA, 2014), 162.

³⁴ Al-Qur'an, 9:119.

adalah keadaan yang sebenarnya. Orang yang memiliki sifat jujur pasti merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dosa.³⁵

b. Karakteristik Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh pengelola kepada semua pihak yang berkepentingan akan informasi tersebut. Berikut ini beberapa karakteristik transparansi, yaitu:³⁶

1. Informatif (*Informativeness*)

Informatif yaitu penyampaian informasi, berita, penjelasan mekanisme pelayanan, data dan fakta yang ada dilapangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator informatif, yaitu:

- a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan juga untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b. Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

³⁵ Fitri Nurwulandari, Indah Ismawati dan Mohamad Djasuli, "Prinsip Akuntabilitas pada Corporate dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis* 2, no. 3 (November, 2022): 613.

³⁶ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar & Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 35-37.

- c. Jelas. Informasi haruslah jelas sehingga mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pemberi informasi dan penerima informasi.
 - d. Akurat. Informasi haruslah tepat dan benar atau bebas dari kesalahan-kesalahan agar tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
 - e. Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi tersebut dengan organisasi lain yang sejenis.
 - f. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan adalah keterbukaan informasi publik artinya memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik. Selain itu, keterbukaan menegaskan bahwa setiap informasi harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan, yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik mengenai aktifitas dan kinerja finansial.

- 1) Kondisi keuangan. Suatu keadaan secara utuh atas keuangan organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- 2) Susunan pengurus. Komponen-komponen yang ada di dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
- 3) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Jika melihat dari karakteristik di atas transparansi merupakan prinsip informatif dan keterbukaan yang memudahkan pengguna informasi dalam mendapatkan dan mengakses informasi secara lebih luas dan akurat. Oleh karena itu, transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan suatu organisasi baik perusahaan atau pemerintahan. Sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dan mengakses informasi baik dari perencanaan sampai hasil yang dicapai oleh sebuah organisasi.

c. Tujuan dan Manfaat Transparansi

Penerapan prinsip transparansi sangatlah penting bagi sebuah organisasi yakni untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan transparansi tidak terlepas dari tujuan dan manfaat dari penerapan

prinsip tersebut. Adapun tujuan dari penerapan prinsip transparansi, yakni:³⁷

1. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal
2. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan
4. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan dan secara keseluruhan.

Selain tujuan-tujuan di atas, penerapan prinsip transparansi pun memiliki manfaat, yaitu:³⁸

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk menentukan kebijakan tertentu
- e. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kapasitas usaha.

³⁷ Usnan, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah)," *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 5, no. 1 (Februari, 2019): 86.

³⁸ Edowai, Herminawaty Abubakar & Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 34.

d. Indikator transparansi

Transparansi memiliki beberapa indikator dalam penerapannya, yakni:³⁹

- 1) Kemudahan mengakses informasi. Pengelola koperasi memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dengan cara menyediakan web yang bisa diakses dengan mudah oleh anggota dan memberikan layanan langsung atau tatap muka dengan baik di setiap jam kerja sedang berlangsung.
- 2) Ketersediaan informasi. Pengelola koperasi menyediakan pamflet atau brosur untuk diberikan kepada anggota dengan tujuan agar menambah wawasan atau pengetahuan tentang koperasi tersebut. Bisa juga dengan pihak pengelola koperasi menyediakan WA grup khusus untuk anggota untuk mempermudah penyampaian informasi dan penyampaian kritik dan saran dari anggota.
- 3) Kerahasiaan informasi. Informasi yang bersifat rahasia tidak bisa diakses dengan mudah atau terbuka, seperti jumlah keuangan koperasi.

2. Teori Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan suatu organisasi atau pemerintahan yang baik. Oleh

³⁹ Imroatus Sholiha, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo," *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 15, no. 1 (Juni 2021):172-173.

karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas suatu organisasi harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik.

Menurut Mardiasmo akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁴⁰

Dalam Islam, akuntabilitas merupakan sikap amanah yang mendorong seseorang untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadist dan paham bahwa semua yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Mu'minun: 8 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya."⁴¹

b. Karakteristik akuntabilitas

Di dalam suatu organisasi akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seluruh aktivitas organisasi selama satu periode kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut karakteristik akuntabilitas, yakni:⁴²

⁴⁰ Edowai, Herminawaty Abubakar & Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 16-17.

⁴¹ Al-Qur'an, 23: 8.

⁴² Edowai, Herminawaty Abubakar & Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 28-29.

1. Integritas keuangan. Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
2. Pengungkapan. Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan akan mempermudah pencatat dalam mempertanggungjawabkannya.
3. Ketaatan. Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah, yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

c. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas

Sama halnya dengan prinsip transparansi, penerapan prinsip akuntabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Sehingga penerapannya sangatlah penting bagi keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Berikut ini adalah tujuan dari penerapan prinsip akuntabilitas:⁴³

- 1) Menciptakan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan keuangan

⁴³ Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, 108.

- 2) Menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat
- 3) Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Selain tujuan-tujuan di atas, upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada sebuah organisasi dimaksudkan untuk:⁴⁴

- 1) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- 2) Mendorong terciptanya transparansi organisasi
- 3) Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- 4) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.

d. Indikator Akuntabilitas

Berikut ini adalah indikator dari penerapan prinsip akuntabilitas:⁴⁵

- 1) Perincian tugas dan tanggungjawab

Pimpinan harus menyampaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan sesuai dengan *job desk* yang

⁴⁴ Tahir, 109.

⁴⁵ Imroatus Sholiha, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo," *Jurnal Lisan Al-Hal* 15, no. 1 (Juni, 2021): 170.

ada secara jelas dan rinci sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.

2) Kompetensi yang sesuai

Perusahaan harus memastikan bahwa semua bagian perusahaan termasuk semua karyawan memiliki kompetensi selaras dengan tugas dan tanggungjawabnya.

3) Pengukuran kinerja

Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

3. Teori Pengelolaan

Setiap bentuk usaha termasuk koperasi, harus berpegang pada fungsi-fungsi manajemen dalam rangka melakukan fungsi-fungsi perusahaan dan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Menurut George R. Terry manajemen ialah suatu proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain.⁴⁶

Berikut fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry:⁴⁷

1) Perencanaan (*Planning*)

⁴⁶ Sadikin, Isra Misra & Muhammad Sholeh Hudin, *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, 2.

⁴⁷ Sadikin, Isra Misra & Muhammad Sholeh Hudin, 24.

Sebelum melakukan kegiatan, setiap organisasi atau perusahaan pasti akan melakukan perencanaan sesuai dengan tujuan usaha. Perencanaan adalah fungsi untuk merencanakan suatu usaha harus terlebih dahulu ditentukan tujuan usaha tersebut, sebab jika tidak demikian masing-masing kegiatan bisa berjalan sendiri-sendiri. Apabila tujuan usaha sudah ditetapkan, sebaiknya ditentukan pula kebijakan-kebijakan, strategi dan taktik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menentukan tujuan dan strategi hendaknya dilakukan berdasarkan metode dan teknik-teknik tertentu seperti teknik mengambil keputusan dan pelaksanaannya.⁴⁸ Perencanaan merupakan langkah terpenting dari keseluruhan proses manajemen bisnis, karena tanpa adanya perencanaan yang matang maka proses bisnis tidak akan berjalan sesuai dengan harapan terlebih lagi sesuai dengan tujuan.

Perencanaan melibatkan dua aspek penting, yaitu tujuan dan rencana. Tujuan adalah hasil yang diinginkan atau target. Karena itulah tujuan sering disebut sebagai dasar perencanaan. Sedangkan rencana adalah dokumen yang menentukan kerangka bagaimana tujuan itu akan terpenuhi. Sehingga tujuan perencanaan adalah mengoptimalkan suatu gagasan dan ide guna mencapai maksud yang telah ditentukan dari awal agar dapat berjalan sebagaimana mestinya

⁴⁸ Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi* (Sumatera Utara: Duta Azhar, 2013), 57-58.

dan terealisasi serta diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaannya.⁴⁹

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan, maka untuk mencapainya diperlukan struktur organisasi yang sesuai dengan jenis kegiatan dan unsur-unsur manajemen yang ikut berfungsi di dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, setiap unsur manajemen harus memiliki wewenang dan tanggungjawab baik secara vertikal maupun horizontal. Bagi koperasi fungsi-fungsi usaha tidak hanya untuk meliputi fungsi-fungsi untuk membentuk perkumpulan modal tetapi juga termasuk pembinaan anggota.

Maka untuk memahami *organizing* dalam usaha koperasi, harus diperhatikan hubungan antara fungsi unsur-unsur manajemen, fungsi usaha koperasi dan fungsi-fungsi organisasi/perusahaan. Fungsi pembelanjaan, produksi, pemasaran, personalia, akuntansi, dan administrasi yang harus ada untuk mencapai tujuan koperasi harus ditentukan dan ditetapkan penanggungjawaban serta pemegang wewenang diantara unsur-unsur manajemen koperasi yang ada sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Dengan demikian *organizing* merupakan fungsi manajemen yang menentukan wewenang dan tanggungjawab unsur-unsur manajemen

⁴⁹ Sadikin, Isra Misra & Muhammad Sholeh Hudin , *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, 24.

dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi usaha koperasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara vertikal maupun horizontal.⁵⁰

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating atau pelaksanaan adalah fungsi pokok manajemen. *Actuating* merupakan kegiatan untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Fungsi ini juga bisa dikatakan sebagai pengarahan.⁵¹

Actuating adalah suatu tindakan untuk mengupayakan setiap anggota kelompok agar bersedia bekerja sama dan secara ikhlas serta sinergi dalam menggapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Dalam definisi ini juga dijelaskan bahwa semua anggota dalam organisasi atau kelompok dapat bekerjasama sesuai dengan keputusan dalam perencanaan.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Planning merupakan rincian kegiatan yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan sumber yang telah tersedia dan yang dapat digunakan. Dalam prakteknya, tidak semua yang dilaksanakan bisa terlaksana sepenuhnya karena adanya hambatan-hambatan yang belum diperkirakan sebelumnya. Berbagai penyimpangan baik disengaja atau tidak selalu terjadi.

⁵⁰ Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, 58-59.

⁵¹ Sadikin, Isra Misra & Muhammad Sholeh Hudin, *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, 16.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik disengaja ataupun tidak, bisa dengan melaksanakan fungsi pengawasan (*controlling*). Pengawasan (*controlling*) adalah fungsi manajemen untuk mencegah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlarut-larut sehingga dapat segera diatasi. Antara perencanaan dan pengawasan tertanam suatu ikatan yang erat. Suatu rencana tanpa pengawasan bisa menjerumuskan organisasi ke jalan yang salah.⁵²

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, apakah pekerjaan yang dilakukan sudah efektif dan efisien.⁵³

4. Teori Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Koperasi Syariah/KJKS/KSPPS/USPPS/BMT, yaitu koperasi yang kegiatan

⁵² Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, 60-61.

⁵³ Sadikin, Isra Misra & Muhammad Sholeh Hudin, *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, 74.

usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁵⁴

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Pinjam Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah)". Dengan demikian, semua Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya dengan syarat memenuhi perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Koperasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar asas kekeluargaan.⁵⁶

Selain itu, landasan dan badan hukum koperasi tertuang dalam Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok

⁵⁴ Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek* (Bandung: ALFABETA, 2020), 26.

⁵⁵ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 36.

⁵⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai organisasi ekonomi global rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata kelola susunan ekonomi sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan.⁵⁷

Sebenarnya antara KSPPS dan BMT sama, hanya saja ada perbedaan pada lembaganya yaitu pada koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja yakni Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat dua lembaga yaitu diambil dari namanya “Baitul Maal Wa Tamwil” yang berarti Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan Syariah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, BMT berarti terdapat dua lembaga yang dijalankan didalamnya yakni Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Lembaga Zakat, sedangkan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah saja disebut Koperasi Syariah.⁵⁸

Secara umum, BMT melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat (anggota) dan penyaluran dana kepada pelaku UMKM. Sistem bagi hasil merupakan pola kerjasama yang dijalankan oleh BMT. Bagi hasil adalah suatu bentuk kesepakatan kerjasama yang membagi keuntungan maupun kerugian usaha yang diperoleh.

b. Produk-Produk KSPPS

Berikut produk-produk pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, meliputi:

⁵⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian..

⁵⁸ Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, 21.

1) Simpanan (Tabungan)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan merupakan simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bisa disimpulkan bahwasanya simpanan atau tabungan dapat diartikan sebagai dana yang disimpan atau dititipkan oleh orang atau badan kepada BMT dan dapat dilakukan penarikan sesuai dengan kesepakatan. Akad simpanan umumnya ada dua macam, yakni akad *mudharabah* (bagi hasil) dan akad *wadi'ah* (titipan). Beberapa nama tabungan yang lazim pada BMT, meliputi:⁵⁹

- a) Tabungan qurban
- b) Tabungan pendidikan
- c) Tabungan haji/umrah
- d) Tabungan berjangka/deposito
- e) Tabungan sukarela
- f) Tabungan wadi'ah (*murni titip*)

2) Pembiayaan (Pinjaman)

Menurut Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”, Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk

⁵⁹ Amalia, 24.

investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁶⁰

Pembiayaan secara luas berarti *financing*, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Sedangkan definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara koperasi syariah/KSPPS/USPPS/BMT dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang.⁶¹ Unsur-unsur dari pembiayaan, yakni:⁶²

- a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shohibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*)
- b) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*

⁶⁰ Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*, 30.

⁶¹ Sukmayadi, 31.

⁶² Sukmayadi, 32.

- c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dai *mudharib* kepada *shahibul maal*
- d) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*
- e) Adanya unsur waktu
- f) Adanya unsur resiko baik dari pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*.

Berikut beberapa jenis pembiayaan yang biasanya terdapat di BMT:⁶³

- a) Murabahah (*jual beli*)

Dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 telah diatur dengan jelas bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

- b) Mudharabah (*bagi hasil*)

Sebagaimana yang telah diakui dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

⁶³ Deny Heryadi dan Mifta Huda, *Buku Panduan Koperasi Syariah* (Jakarta: PT.BSIN, 2021), 7-16.

c) Musyarakah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

d) Ijarah (*sewa*)

Menurut fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

e) Wakalah (*jasa*)

Pada fatwa DSN N0.10/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa wakalah merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Karena penelitian ini lebih menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber terkait.⁶⁶

⁶⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 5.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

⁶⁶ Sugiyono, 10.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Lumajang. Kantor pusat BMT NU Lumajang ini terletak di tengah-tengah kota, lebih tepatnya di Jl. Alun-Alun Timur, No. 3, Kecamatan Jogotrunan, Kabupaten Lumajang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, yakni karena prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan di KSPPS BMT NU Lumajang ini, yang bisa terlihat dari transparansi kepada pengurus. Jadi, *teller* atau bagian pelayanan rutin mengupdate informasi kepada pengurus terkait laporan transaksi harian dan laba rugi bulanan setiap hari di akhir jam kerja. Sedangkan pada akuntabilitas bisa terlihat dari penyajian laporan keuangan yang disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara periodik mengenai pengelolaan sumber daya yang ada di BMT NU Lumajang. Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari subyek penelitian. Untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang diteliti maka diperlukan informan atau subyek penelitian. Subyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pimpinan dan karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang. Dari subyek-subyek penelitian yang dipilih maka akan didapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini. Subyek penelitian

dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* dengan kriteria informan yang dapat dipercaya untuk menjawab fokus penelitian, yakni pimpinan dan karyawan yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional BMT NU Lumajang. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa informan yaitu:

- 1) Ibu Anik Karomah, S.E. selaku Pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang.
- 2) Ibu Muhabbah, S.E. dan Bapak Ahmad Muzakki, S.E. selaku *Teller* KSPPS BMT NU Lumajang.
- 3) Bapak Abdul Gofar, Ibu Riska, Ibu Lasmi selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara untuk mendapatkan data penelitian. Dengan teknik pengumpulan data ini akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang diinginkan. Berikut teknik-teknik pengumpulan data pada penelitian ini:

1. Observasi

Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak secara langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan menggambarkan secara sistematis kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan

direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk menemukan gambaran dan keterangan yang jelas tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang berisi percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung atau tatap muka baik secara terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan di dalam penelitian. Prosedur melakukan wawancara, dimulai dengan percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara peneliti dengan subyek, kemudian mulai membicarakan persoalan yang diharapkan dengan memberitahu tujuan penelitian serta meyakinkan subyek bahwa yang dibicarakan akan dirahasiakan.⁶⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi struktur, yaitu peneliti memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali keterangan dari narasumber. Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai model pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang, dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang.

⁶⁷ Sugiyono, 145.

⁶⁸ Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119-120.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah sebuah bahan tertulis ataupun foto yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.⁶⁹ Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada KSPPS BMT NU Lumajang.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁰

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

⁷⁰ Sugiyono, 244.

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁷¹

Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman yang terdiri dari:⁷²

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁷³

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.⁷⁴

Dalam tahapan ini data tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada BMT NU Lumajang yang beragam dianalisis dengan

⁷¹ Sugiyono, 147.

⁷² Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, 148.

⁷³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 161.

⁷⁴ Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, 148.

cara direduksi, yaitu dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan fokus kajian penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi matrik, grafik, flowchart dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.⁷⁵

Setelah tahapan reduksi data, proses selanjutnya yaitu penyajian data mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang.

3. Kesimpulan

Setelah data disajikan, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Verifikasi data adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan dan tukar pikiran dengan teman sejawat. Jadi setiap data yang didapatkan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitas.⁷⁶

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan atau fokus masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah

⁷⁵ Salim & Syahrums, 149-150.

⁷⁶ Salim & Syahrums, 150-151.

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif.⁷⁷

Pada tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang.

F. Keabsahan Data

Secara umum data harus memenuhi syarat keabsahan (*validitas*) dan keajegan (*kredibilitas*). Data penelitian harus memenuhi tingkat kebenaran dan derajat kepercayaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan teknik yang harus ditempuh untuk menunjukkan bahwa data yang terkumpul benar-benar terdapat secara alami dan umum.⁷⁸

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber dideskripsikan dan dikategorisasikan. Manakah yang pandangannya sama atau berbeda.⁷⁹

⁷⁷ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 162.

⁷⁸ Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, 165.

⁷⁹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Beberapa tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap di mana peneliti mencari fenomena dan latar belakang serta referensi yang terkait dengan tema di lapangan. Peneliti mendapatkan fenomena mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas terkait dengan pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Syariah di BMT NU Lumajang.

Adapun tahapan-tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pelaksanaan penelitian
 - b. Memilih lokasi penelitian
 - c. Mengurus surat perizinan penelitian
 - d. Memilih dan memanfaatkan informan
 - e. Mempersiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian.
- ### 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk melihat, memantau dan meninjau langsung lokasi penelitian di KSPPS BMT NU Lumajang. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan mencari serta mengumpulkan data-data dengan alat yang sudah disediakan baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut diproses untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan teknik analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung atau selama peneliti berada di lapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa jenis data yang sudah diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapat dari lapangan dengan teori yang digunakan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT NU Lumajang

KSPPS BMT NU Lumajang telah berdiri kurang lebih 2,5 tahun. Berdirinya KSPPS BMT NU Lumajang berawal dari diadakannya Konferensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lumajang yang bertempat di kediaman Rois Suriah KH. Husni Zuhri, tepatnya di Pondok pesantren Banyuputih Kidul. Konferensi tersebut diadakan dalam rangka membahas solusi dari banyaknya permasalahan praktik muamalah di Lumajang yang kurang sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan diadakannya konferensi tersebut ialah untuk mencari solusi agar masyarakat benar-benar bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ditindak lanjuti pada acara Rapat Jajaran Syuriah dan Tanfidziyah, rapat LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama) Lumajang, serta Rapat Koperasi Bintang Sembilan LPNU Lumajang. Setelah melalui beberapa tahapan rapat, koordinasi serta musyawarah maka lahirlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang yang murni di bawah naungan LPNU Lumajang serta diamanahi oleh PCNU Lumajang.

KSPPS BMT NU Lumajang merupakan Pusat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang ada dan asli milik Lumajang, yang menjadi acuan dari BMT ini yaitu BMT NU Jombang. KSPPS BMT NU

Lumajang terletak di Jalan Alun-Alun Timur, No. 3, Kecamatan Jogotrunan, Kabupaten Lumajang, lebih tepatnya berada di gedung PCNU Lumajang. Di BMT NU Lumajang terdapat tiga bagian yakni bagian pembiayaan, *teller*, pemasaran atau penarikan.

KSPPS BMT NU Lumajang merupakan suatu koperasi yang bergerak dibidang pembiayaan (pinjaman) dan simpanan (tabungan). BMT NU Lumajang merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam mengembangkan usahanya.

Awalnya BMT NU ini memiliki empat kantor kas, yang terletak di Jatiroto, Pasirian, Pasrujambe, Rowokangkung. Dari keempat kantor kas ini, 2 diantaranya sudah menjadi kantor cabang BMT NU Lumajang yakni Pasirian dan Jatiroto. Saat ini KSPPS BMT NU Lumajang sudah memiliki 4 kantor cabang yakni BMT NU cabang Jatiroto, Pasirian, Pasrujambe dan Senduro. Syarat untuk menjadi kantor cabang harus memenuhi target, targetnya yakni sebesar 100.000.000. Kegiatan utama KSPPS BMT NU Lumajang yakni mengumpulkan dana (tabungan) dan menyalurkan dana (pembiayaan).

2. Visi & Misi KSPPS BMT NU Lumajang

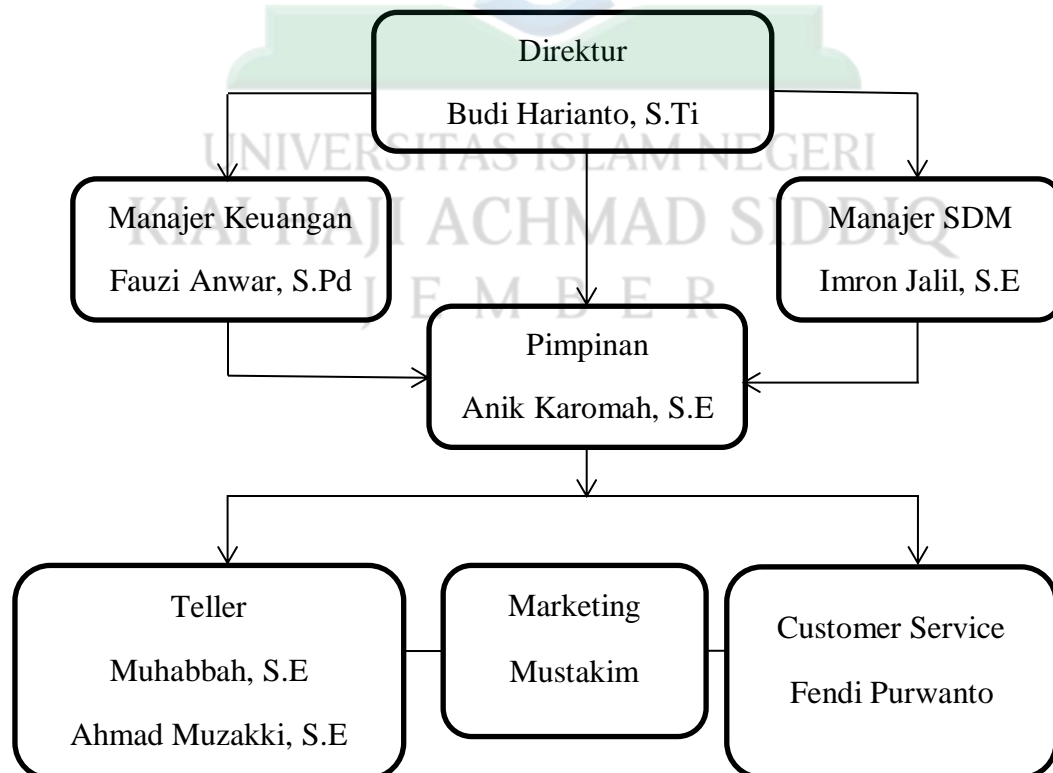
Adapun visi misi didirikannya KSPPS BMT NU Lumajang ialah sebagai berikut:

- a. Menjadikan lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat dan kuat
- b. Menjadikan alat perjuangan NU di bidang ekonomi, bersama memenuhi kebutuhan warga NU
- c. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga NU Lumajang, serta mendorong membangun ekonomi masyarakat sekitar dengan berlandaskan syariat Islam Ahlusunah wal jamaah An-Nahdliyah.

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Lumajang

Struktur organisasi adalah susunan yang berisi tentang pembagian tugas dan peran anggota organisasi sesuai dengan jabatannya. Dengan adanya struktur organisasi dapat memudahkan proses kerja organisasi. Struktur organisasi membentuk koordinasi antar karyawan untuk menjaga komunikasi agar tetap baik.

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Lumajang



Tugas dan wewenang masing-masing bagian KSPPS BMT NU Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Melakukan pengawasan secara keseluruhan aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan dan memberikan arahan sebagai upaya meningkatkan kualitas BMT.

2. Manajer

- a. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran BMT NU, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi finansial maupun non finansial kepada pengurus, yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota.
- b. Melaksanakan kebijakan umum BMT NU yang telah dibuat Badan Pengurus dan disetujui di Rapat Anggota.
- c. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tak melampaui batas wewenang manajemen.
- d. Mengusulkan kepada Badan Pengurus tentang penambahan, pengangkatan, pemberhentian karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional BMT-NU.
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

- f. Mengamankan harta kekayaan BMT NU agar terlindung dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan, serta seluruh aset BMT NU.
 - g. Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodik kepada Badan Pengurus, berupa:
 - 1. Bertanggung jawab atas selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh bidang/bagian
 - 2. Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target
 - 3. Bertanggung jawab atas terealisasinya semua program kerja
 - 4. Terjalannya kerjasama dengan pihak lain secara baik dan menguntungkan dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga
 - 5. Bertanggung jawab atas tersedianya bahan Rapat Anggota Tahunan
 - 6. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada
 - 7. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional.
3. Pimpinan
- a. Mengendalikan semua aktifitas koperasi
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan aktifitas-aktifitas yang ada di koperasi

- c. Menerima laporan tentang aktifitas yang dilakukan masing-masing bagian
 - d. Melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada anggota pada Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - e. Mengambil keputusan untuk hal-hal penting yang berkaitan dengan operasional koperasi
4. *Customer Service (CS)*
- a. Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan simpanan berjangka serta mutasinya yang meliputi:
 1. Meminta anggota untuk melengkapi persyaratan menjadi anggota (dengan mengisi formulir pendaftaran anggota, menyerahkan tanda pengenal, mengisi aplikasi, mengisi slip simpanan awal)
 2. Menerima kelengkapan mitra dan memberikan penjelasan mengenai produk tabungan dan simpanan berjangka yang ada di BMT NU
 3. Menandatangani slip pembukuan tabungan (buku tabungan dan formulir permohonan menjadi anggota/calon anggota)
 4. Menyerahkan kembali kertas persyaratan dan slip-slip pada bagian pembukuan
 5. Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada mitra yang baru

6. Membuatkan warkat simpanan berjangka dan memberikan nomor simpanan berjangka
 7. Melakukan atau membuat registrasi tabungan dan simpanan berjangka baik di komputer maupun di buku registrasi
 8. Melakukan pemindahan buku tabungan dan simpanan berjangka apabila diperlukan atas persetujuan yang berwenang
 9. Menyerahkan kepada mitra (anggota) buku tabungan atau tanda anggota
 10. Menyimpan kartu tabungan ke dalam tempat yang telah ditentukan.
- b. Persiapan tabungan dan simpanan berjangka meliputi:
1. Melakukan pengarsipan untuk permohonan tabungan dan simpanan berjangka pada binder khusus sesuai tanggal
 2. Melakukan pengarsipan untuk kartu tabungan sesuai dengan nomor rekening
 3. Melakukan pengarsipan atas warkat simpanan berjangka sesuai dengan nomor rekening.
- c. Perhitungan bagi hasil dan pembukuannya, meliputi:
1. Melakukan perhitungan bagi hasil harian atau akhir bulan (khusus untuk yang tanpa *software*)
 2. Melakukan pendistribusian bagi hasil (khusus untuk yang tanpa *software*).
- d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat, meliputi:

1. Menerbitkan laporan simpanan berjangka yang akan jatuh tempo
 2. Menerbitkan laporan perbandingan rencana dan realisasi target capaian funding pada akhir bulan.
- e. Register awal pengajuan pembiayaan/ilustrasi/wawancara.
5. *Marketing*
- a. Mengumpulkan simpanan penabung dan menawarkan produk BMT
 - b. Mengumpulkan informasi tentang calon penabung atau pun pihak ketiga
 - c. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat
6. *Teller*
- a. Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas yang meliputi:
 - 1) Melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari yakni saat akan dimulainya dan diakhirnya hari kerja
 - 2) Meneliti setiap keaslian uang masuk agar terhindar dari uang palsu
 - 3) Menjaga ruangan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan
 - 4) Mengarsipkan laporan mutasi *vault* pada tempat yang aman
 - 5) Melakukan *cross check* antara *vault* dengan neraca rekapitulasi kas.
 - b. Menyelesaikan laporan kas harian yang meliputi menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang

- c. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi
- d. Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk serta memberikan nomor bukti
- e. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar
- f. Meminta validasi dari pihak yang berwenang
- g. Melakukan *cross check* antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault dan neraca.
- h. Menyediakan laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi yang meliputi:
 - 1) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting
 - 2) Meminta pengesahan laporan arus kas dari yang berwenang sebagai laporan yang sah.
- i. Menerima setoran dan penarikan tabungan yang meliputi:
 - 1) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip setoran (dalam slip setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka dan huruf dengan nilai yang sama)
 - 2) Pengisian slip harus ditulis dengan jelas
 - 3) Mencocokkan saldo tabungan pada buku tabungan anggota dengan kartu tabungan anggota bersangkutan yang ada di komputer

- 4) Membubuhkan stempel pada slip setelah dimasukkan ke dalam komputer
- 5) Menyerahkan *copy* slip setoran kepada anggota sebagai bukti penerimaan setoran
- 6) Menyerahkan semua slip setoran kepada bagian umum setelah tutup jam kas
- 7) Menerima dan memeriksa slip penarikan, kartu dan buku simpanan anggota
- 8) Memeriksa dan membubuhkan paraf tanda persetujuan pimpinan (paraf pada slip pengambilan) atas pengambilan tabungan tersebut (perhatikan saldo yang tersisa harus memenuhi ketentuan yang ada)
- 9) Mencatat jumlah pengambilan tabungan pada buku tabungan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang

Pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan baik. Menurut George R. Terry pengelolaan yang baik melalui beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Perencanaan

Tahap pertama dalam pengelolaan koperasi yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan dasar dalam menentukan, melaksanakan, dan mencapai tujuan tersebut. Dengan perencanaan yang matang maka

proses bisnis akan berjalan sesuai dengan harapan dan tentunya sesuai dengan tujuan. Dalam proses perencanaan produk simpanan dan pembiayaan sudah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). RAPB ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan produk simpanan dan pembiayaan untuk jangka waktu satu periode.

Dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Anik Karomah mengungkapkan bahwa:⁸⁰

Dalam merencanakan kinerja koperasi selama satu tahun berjalan pada periode berikutnya, kami melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan koperasi mulai dari pengurus hingga anggota koperasi. Perencanaan ini dibuat sebelum RAT dilaksanakan dan akan diputuskan pada saat RAT berlangsung. Rencana kinerja koperasi ini dalam bentuk dokumen berupa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa dalam merencanakan kinerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang untuk satu periode berikutnya melibatkan banyak pihak seperti pengurus dan anggota koperasi. Perencanaan ini dibuat sebelum Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan dan akan diputuskan ketika RAT. Dokumen rencana kerja KSPPS BMT NU Lumajang ini berupa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

⁸⁰ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

Untuk mencapai tujuan koperasi, perencanaan harus disusun dengan baik. Perencanaan ini berkaitan dengan pengelolaan kemampuan, masalah dan potensi yang dimiliki oleh koperasi saat ini yang kemudian diarahkan untuk mencapai target koperasi. Penyusunan perencanaan ini untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan perencanaan yang ada, kemudian dibuatlah kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana tersebut. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) perencanaan yang telah disusun, dibahas dan mendapatkan pengesahan.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan teller 1 KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Muhabbah mengungkapkan bahwa:⁸¹

Sistem perencanaan baik simpanan ataupun pembiayaan itu sudah ada di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Jadi, untuk program tahun depan itu sudah dibahas pada tahun sebelumnya dan diputuskan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Misal, tahun 2023 untuk program yang akan dilakukan tahun 2023 sudah direncanakan pada tahun 2022 dan telah diputuskan pada saat RAT.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan, program kerja KSPPS BMT NU Lumajang untuk satu periode berikutnya dibahas pada tahun sebelumnya dan diputuskan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) baik itu perencanaan simpanan ataupun pembiayaan.

Perencanaan ini disusun oleh KSPPS BMT NU Lumajang sebelum Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan.

⁸¹ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

Pengesahannya akan dilakukan saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan. Perencanaan ini juga melalui beberapa kali rapat sehingga disusun dengan sangat matang. Perencanaan ini disusun untuk program kerja satu tahun berikutnya. Sehingga perencanaan ini merupakan strategi dalam pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan yang baik akan memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi.

Kemudian wawancara dengan *Teller 2* KSPPS BMT NU Lumajang, Bapak Ahmad Muzakki mengungkapkan bahwa:⁸²

Perencanaan produk simpanan dan pembiayaan itu dibahas sebelum RAT dilakukan yang dimana akan diputuskan pada saat RAT. Perencanaan yang dimaksud di sini untuk satu periode tahun berikutnya. Pada saat RAT perencanaan ini sudah dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan produk simpanan dan pembiayaan dibahas sebelum RAT dan diputuskan pada saat RAT. Perencanaan ini untuk satu periode berikutnya dan sudah dalam bentuk dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara di atas didapat kesimpulan perencanaan untuk kinerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang selama satu periode berikutnya dirancang dan disusun sebelum Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan dan akan diputuskan ketika RAT.

⁸² Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

Perancangan dan penyusunan perencanaan ini melibatkan banyak pihak, seperti direktur, manajer, pimpinan dan semua pengelola KSPPS BMT NU Lumajang. Perencanaan-perencanaan yang telah dirancang dan disusun ini disajikan dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

b. Pengorganisasian

Dalam menjalankan tujuan yang telah direncanakan maka diperlukan struktur organisasi yang sesuai dengan manajemen organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap unsur manajemen harus memiliki hak dan tanggungjawab baik secara vertikal atau horizontal. *Organizing* pada koperasi harus diperhatikan dengan baik. Untuk mencapai tujuan harus ditetapkan penanggungjawab dari setiap unsur manajemen agar sesuai antara fungsi dan kedudukannya masing-masing. Jadi, pengorganisasian itu proses penyusunan struktur organisasi dan sumberdaya yang dimiliki dalam mencapai tujuan organisasi.

Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang mengungkapkan bahwa:⁸³

Pastinya saling koordinasi ya satu sama lain dalam menjalankan aktifitas yang ada di sini. Contohnya, ketika ada pihak ketiga yang akan menggunakan salah satu produk pembiayaan di sini, antara *Customer Service* (CS) berkoordinasi dengan bagian pelayanan untuk menginput data pembiayaan pihak ketiga tersebut ke sistem.

⁸³ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing bagian KSPPS BMT NU Lumajang saling koordinasi satu sama lain dalam menjalankan aktifitas-aktifitas yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang.

Dengan pengorganisasian ini mempermudah koordinasi dalam sebuah koperasi. Pengorganisasian yang baik meringankan pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam mencapai tujuan koperasi. Pengorganisasian ini membagi tugas dan wewenang masing-masing jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Apabila pengorganisasi ini tidak berjalan dengan baik mengakibatkan hambatan pada sistem kerja koperasi. Dimana pembagian tugas dan wewenang menjadi tidak kondusif dan tidak adil.

Kemudian wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller 1* KSPPS BMT NU Lumajang mengungkapkan bahwa:⁸⁴

Taip-tiap bagian di struktur organisasi itu pasti saling koordinasi ya karena kalau tidak, akan kesulitan dalam mencapai tujuan organisasi. Semisal ada pembiayaan bermasalah, kami pasti koordinasi dengan pimpinan. Agar masalah ini mendapatkan solusi yang tepat. Pak Fendi selaku (*CS*) tidak jarang juga berperan sebagai *funding officer* karena ikut terjun langsung ke lapangan dalam mencari dan memberikan informasi kebijakan yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang kepada nasabah.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing bagian yang ada di struktur organisasi itu saling koordinasi agar tidak mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan

⁸⁴ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

koperasi. Pada KSPPS BMT NU Lumajang terjadi rangkap jabatan pada bagian *Customer Service (CS)*.

Suatu organisasi atau perusahaan tidak bisa dikelola dengan baik apabila tidak memiliki struktur organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi berperan penting untuk kelancaran aktifitas yang ada di suatu koperasi. Tugas dan wewenang yang diberikan harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing bagian koperasi. Apabila tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, besar kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sehingga sangat perlu memperhatikan kemampuan tiap-tiap karyawan agar tidak terjadi kesalahan pembagian tugas dan wewenang.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki selaku *Teller 1 KSPPS BMT NU Lumajang* mengungkapkan bahwa:⁸⁵

“Untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi harus ada koordinasi pada tiap-tiap unsur organisasi. Di sini kan ada dua *teller* ya, nah kami di sini harus koordinasi satu sama lain. Agar tidak terjadi mis komunikasi dalam pencatatan keuangan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi maka diperlukan koordinasi pada masing-masing bagian agar tidak terjadi mis komunikasi.

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pada sebuah struktur organisasi sangat diperlukan adanya koordinasi satu sama lain pada masing-masing bagian. Pada KSPPS BMT NU

⁸⁵ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

Lumajang juga dilakukan koordinasi satu sama lain antar bagian untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, dilakukannya koordinasi juga bertujuan untuk menghindari terjadinya mis komunikasi. Koordinasi antar bagian struktur organisasi yang terjadi di KSPPS BMT NU Lumajang, salah satunya terlihat pada penanganan pembiayaan bermasalah dimana bagian pelayanan berkoordinasi dengan pimpinan dalam mendapatkan solusi untuk penyelesaian pembiayaan masalah tersebut. Namun, pada KSPPS BMT NU Lumajang ini terdapat rangkap jabatan pada bagian *Customer Service (CS)*.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah bentuk tindakan agar tiap-tiap unsur organisasi menjalankan tugasnya sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Diharapkan setiap unsur organisasi bersedia bekerjasama dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan ini harus sesuai dengan perencanaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, pelaksanaan juga harus sesuai dengan pengorganisasian yang ada.

Hasil wawancara dengan pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Anik Karomah yang mengungkapkan bahwa:⁸⁶

Sistem pelaksanaan produk simpanan dan pembiayaan pastinya sesuai dengan perencanaan yang sudah diputuskan saat RAT yang ada di RAPB. Target yang harus dicapai hingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama satu periode. Adanya sistem pemberian *reward* juga memotivasi karyawan-karyawan

⁸⁶ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

di sini untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pelaksanaan baik untuk produk simpanan atau pembiayaan harus sesuai dengan perencanaan yang sudah diputuskan sebelumnya pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Perencanaan ini ada pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Adanya sistem *reward* juga memotivasi karyawan-karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pencapaian target dilakukan dengan melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan. Dengan berpedoman pada perencanaan yang ada akan memudahkan lembaga keuangan dalam menjalankan operasional lembaga keuangan tersebut. Sehingga sistem pelaksanaan sangat berkaitan erat dengan perencanaan yang sebelumnya ditetapkan bersama. Pelaksanaan rencana-rencana yang ada membutuhkan strategi-strategi dalam merealisasikannya. Strategi yang baik akan menunjang kemudahan merealisasikan perencanaan yang ada.

Kemudian wawancara dengan *Teller* 1 KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Muhabbah mengungkapkan bahwa:⁸⁷

Sistem pelaksanaan di sini ya tidak jauh-jauh dari RAPB itu. Karena RAPB itu dibuat untuk dilaksanakan. Sistem pelaksanaan produk simpanan dan pembiayaan di sini karena koperasi syariah jadi kami menggunakan sistem bagi hasil dengan akad yang sudah disepakati bersama diawal. Beberapa dari kami juga sempat ikut pelatihan kepegawaian yang diadakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang. Dari sana

⁸⁷ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

kami mendapatkan bimbingan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab kami dengan baik.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang baik pelaksanaan produk simpanan maupun pembiayaan itu mengarah pada RAPB yang sudah ditetapkan bersama pada saat RAT. Pelaksanaan produk simpanan dan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan akad yang sudah disepakati bersama diawal. Selain itu, adanya beberapa kegiatan seperti pelatihan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang juga membantu memberikan bimbingan bagi semua karyawan koperasi yang ada di Kabupaten Lumajang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik tanpa adanya manipulasi sedikitpun.

Sistem pelaksanaan pada KSPPS BMT NU Lumajang mengacu pada perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan ini sudah berupa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). RAPB ini dirancang untuk satu tahun berjalan. Sehingga pelaksanaan operasional KSPPS BMT NU Lumajang berpedoman pada RAPB yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan RAPB ini diharapkan dapat terealisasikan semua dan dalam pelaksanaannya tidak menyimpang jauh. Sehingga KSPPS BMT NU Lumajang dapat mencapai semua target perusahaan.

Setelah itu dilanjutkan wawancara dengan *Teller 2* KSPPS BMT NU Lumajang, Bapak Ahmad Muzakki mengungkapkan bahwa:⁸⁸

Beberapa dari kami itu pernah ikut pelatihan kepegawaian, selain itu ada sistem *reward* juga di sini. Dari situ memotivasi kami untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab kami dengan baik. Untuk pelaksanaan pada produk simpanan dan pembiayaan kami di sini menggunakan sistem bagi hasil.

Dari hasil wawancara tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa selain adanya kegiatan pelatihan, KSPPS BMT NU Lumajang mengadakan sistem *reward* untuk karyawan-karyawannya. Sistem pelaksanaan baik untuk produk simpanan ataupun produk pembiayaan itu dilaksanakan dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan sistem pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan pada produk simpanan dan pembiayaan menerapkan prinsip bagi hasil karena KSPPS BMT NU Lumajang merupakan koperasi syariah. Selain itu, pada sistem pelaksanaan ini KSPPS BMT NU Lumajang menerapkan sistem *reward* untuk karyawan-karyawan yang berhasil mencapai atau melebihi target yang ada. Selain pemberian *reward*, KSPPS BMT NU Lumajang mengharuskan karyawan-karyawannya agar mengikuti

⁸⁸ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

pelatihan kepegawaian, seperti pelatihan yang sempat diadakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang.

d. Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) ialah fungsi manajemen dalam membantu menyelesaikan tanggungjawabnya secara efektif melalui analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik disengaja ataupun tidak disengaja agar bisa segera diatasi. Pada realitanya, tidak semua yang dilaksanakan bisa terlaksana dengan baik karena adanya hambatan-hambatan yang terjadi diluar perkiraan sebelumnya.

Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Anik Karomah mengungkapkan:⁸⁹

Pengawasan di BMT ini dilakukan oleh dua pengawas, *Pertama* pengawas internal itu pengurus dan pengawas dari BMT NU Jombang. Untuk pengawas dari BMT NU Jombang ini setiap hari melakukan pengawasan via online. Kalau pengawasan yang dilakukan oleh pengurus itu biasanya per triwulan. *Kedua*, pengawas eksternal yaitu Dinas Koperasi Lumajang. Dinas Koperasi ini biasanya dua kali pengawasan dalam setahun.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang ada dua, yaitu pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal berasal dari pengurus KSPPS BMT NU Lumajang dan pengawas dari KSPPS BMT NU Jombang. Pengawas dari KSPPS BMT NU Jombang melakukan

⁸⁹ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

pengawasan via online yang dilakukan setiap hari. Sedangkan pengawas dari pengurus BMT NU Lumajang melakukan pengawasan per triwulan, artinya pengawasan dilakukan empat kali selama satu periode. Berbeda dengan pengawas eksternal yang melakukan pengawasan sebanyak dua kali dalam satu periode, yaitu Dinas Koperasi.

Sistem pengawasan ini dilakukan untuk memeriksa kesehatan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan PermenKop UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Pengawasan (*controlling*) ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang mungkin terjadi baik penyimpangan pada saat menjalankan tugas dan wewenang, penyimpangan pada keuangan, dan lain sebagainya. Dengan pengawasan ini diharapkan bisa menghasilkan koperasi yang sehat dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan koperasi yakni membantu masyarakat pada kegiatan ekonomi dengan melalui pemberian modal usaha.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan *Teller* 1 KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Muhabbah yang mengungkapkan bahwa:⁹⁰

Untuk sistem pengawasan di sini ada dua, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pengurus dan pengawasnya BMT. Kalau eksternal dilakukan oleh dinas koperasi. Biasanya kalau dari dinas koperasi itu setahun dua kali. Sedangkan kalau dari pengurus dan pengawas BMT sendiri itu per triwulan atau setahun empat kali. Pengawas BMT

⁹⁰ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

ini kan bukan hanya dari lumajang saja, ada yang dari Jombang. Kalau yang dari Jombang ini setiap hari ngontrol gimana keuangan di sini, baik simpanan atau pembiayaan di sini yang dilakukan via online. Sedangkan pengawas lokal itu tidak setiap hari ngontrol karena memiliki kesibukan masing-masing.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan di KSPPS BMT NU Lumajang dilakukan oleh dua pengawas, yakni pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal dilakukan oleh pengurus per triwulan dan pengawas dari KSPPS BMT NU Jombang setiap hari via online. Sedangkan untuk pengawas eksternal dilakukan dua kali dalam satu tahun oleh Dinas Koperasi Lumajang.

Sistem pengawasan KSPPS BMT NU Lumajang memiliki dua pengawas yaitu pengawas internal dan eksternal. Pengawasan ini bertujuan untuk memantau kinerja karyawan KSPPS BMT NU Lumajang. Selain itu, pengawasan ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki bagian-bagian yang kurang atau perlu untuk diperbaiki. Sehingga semua yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan pengawasan bisa diketahui berhasil tidaknya suatu pelaksanaan perencanaan dalam mencapai target organisasi.

Setelah itu dilanjutkan wawancara dengan *Teller* 1, Bapak Ahmad Muzakki yang mengungkapkan bahwa:⁹¹

Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Anik dan Mbak Bibah, di sini itu ada dua pengawas. Pengawas internal dan eskternal.

⁹¹ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

Internal itu pengurus BMT NU Lumajang sendiri dan pengawas dari BMT NU Jombang. Kalau pengawas eksternalnya dari Dinas Koperasi.

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa sistem pengawasan yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang memiliki dua pengawas, yakni pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal dilakukan oleh pengurus dan pengawas dari KSPPS BMT NU Jombang, sedangkan untuk pengawas eksternal dilakukan oleh Dinas Koperasi Lumajang.

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat kesimpulan pengawasan di KSPPS BMT NU Lumajang terdapat dua pengawas, yakni pengawas internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pengurus KSPPS BMT NU Lumajang dan pengawas dari KSPPS BMT NU Jombang. Sedangkan untuk pengawas eksternal dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang. Dalam pengawasannya terhadap KSPPS BMT NU Lumajang, dua pengawas ini tentunya melakukan pengawasan di waktu yang berbeda. Pengawas internal dari pengurus KSPPS BMT NU Lumajang melakukan pengawasan per triwulan dan pengawas dari KSPPS BMT NU Jombang melakukan pengawasan setiap hari via online. Untuk pengawas eksternal yakni Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang melakukan pengawasan dua kali dalam satu periode.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang menyusun rencana-rencana yang akan direalisasikan

pada periode berikutnya sebelum Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan dan akan diputuskan atau disahkan pada saat RAT. Perencanaan ini melibatkan banyak pihak yakni pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Perencanaan ini kemudian disajikan dalam bentuk dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Dalam pencapaian tujuan koperasi, sistem pengorganisasian di KSPPS BMT NU Lumajang dilaksanakan dengan baik. Masing-masing bagian pada struktur organisasi saling koordinasi dalam melaksanakan aktifitas-aktifitas yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang agar tidak terjadi mis komunikasi. Namun, pada KSPPS BMT NU Lumajang terdapat rangkap jabatan pada bagian *Customer Service (CS)*.

Sistem pelaksanaan produk simpanan dan pembiayaan di KSPPS BMT NU Lumajang ini menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Untuk meningkatkan kesadaran pelaksanaan tanggungjawab dan memotivasi karyawannya, KSPPS BMT NU Lumajang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pelatihan seperti pelatihan kepegawaian yang diadakan oleh Dinas Koperasi Lumajang serta adanya kebijakan pemberian *reward* kepada karyawan-karyawannya. Sistem pengawasan di KSPPS BMT NU Lumajang memiliki dua pengawas, yakni pengawas internal dan eskternal. Pengawas internal, meliputi pengurus KSPPS BMT NU Lumajang dan pengawas dari KSPPS BMT NU Jombang. Karena

KSPPS BMT NU Jombang menjadi acuan dalam pencatatan keuangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus KSPPS BMT NU Lumajang dilakukan per triwulan atau empat kali dalam setahun, sedangkan untuk pengawas dari KSPPS BMT NU Jombang pengawasan dilakukan setiap hari via online. Pengawas eksternal dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun.

2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang

Transparansi berarti ketersediaan informasi seluruh kegiatan operasional ataupun kegiatan suatu unit usaha yang dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Artinya, informasi yang dibutuhkan tersedia secara cuma-cuma. Dengan transparansi ini dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh bagian-bagian dari koperasi baik itu pengurus, pengelola dan karyawan. Transparansi ini memiliki beberapa karakteristik yang meliputi:

a. Informatif (*Informativennes*)

Informatif ialah penyampaian informasi mengenai seluruh kegiatan yang ada di perusahaan baik itu mengenai mekanisme pelayanan atau prosedur-prosedur untuk menggunakan produk-produk yang ada di sebuah unit usaha. Informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, tepat waktu, memadai, dapat diperbandingkan dan mudah

diakses. Informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi yang informatif apabila memenuhi indikator-indikator tersebut.

Hasil wawancara dengan pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Anik Karomah:⁹²

Di sini itu kami menggunakan sistem dalam pencatatan keuangan baik itu pemasukan atau pengeluaran. Jadi, pencatatannya itu harus dilakukan saat transaksi itu dilakukan. Kemudian sistem akan mengolahnya menjadi laporan keuangan. Kami bertanggungjawab dalam memberikan informasi terbaru kepada pengurus dan juga pengawas dari KSPPS BMT NU Jombang karena akan mengecek laporan keuangan BMT setiap harinya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangan baik pemasukan atau pengeluaran KSPPS BMT NU Lumajang menggunakan sistem. Dengan menggunakan sistem ini, maka pencatatan keuangannya harus dilakukan pada saat transaksi tersebut berlangsung. Setelah itu, sistem akan mengolah data-data transaksi tersebut menjadi laporan keuangan. Bagian pelayanan bertanggungjawab untuk memberikan informasi terbaru kepada pengawas internal setiap harinya.

Penyampaian informasi oleh pemberi informasi kepada penerima informasi haruslah jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Informasi yang disampaikan juga harus benar agar tidak menjerumuskan penerima informasi. Informasi yang informatif ialah informasi yang bisa dengan mudah diakses oleh semua pihak. Informasi yang mudah diakses ini dapat dijadikan acuan dalam

⁹² Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

pengambilan keputusan. Selain itu, bisa menghindari tertundanya pengambilan keputusan.

Wawancara dengan *Teller* 1 KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Muhabbah:⁹³

Pencatatan keuangan yang terjadi setiap harinya itu langsung kami proses atau kami input ke sistem. Kemudian oleh sistem akan otomatis diakumulasi dengan data keuangan sebelumnya yang sudah tercatat di sistem. Di akhir jam kerja kami bertanggungjawab untuk mengirimkan informasi terbaru berupa laporan neraca harian dan laba rugi bulanan. Informasi ini tentunya jelas dan akurat karena pencatatan dilakukan sesuai dengan transaksi yang terjadi saat itu baik itu pengeluaran maupun pemasukan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi setiap harinya langsung diproses dan di input ke sistem keuangan KSPPS BMT NU Lumajang. Transaksi-transaksi yang terjadi pada hari itu akan langsung terakumulasi dengan data keuangan sebelumnya. Setiap akhir jam kerja *teller* bertugas untuk mengirimkan data neraca harian dan laba rugi bulanan KSPPS BMT NU Lumajang kepada pengawas internal. Pemasukan ataupun pengeluaran dicatat pada saat transaksi itu terjadi sehingga datanya jelas dan akurat.

Penyampaian informasi oleh KSPPS BMT NU Lumajang terlihat dari pencatatan keuangan yang menggunakan sistem. Dari pencatatan keuangan tersebut memudahkan dalam pengelolaan keuangan. *Teller* bertugas untuk menyampaikan informasi yang paling *update* dari KSPPS BMT NU Lumajang. Informasi tersebut berupa

⁹³ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran atau aktifitas keuangan dari KSPPS BMT NU Lumajang.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Ahmad Muzakki sebagai *Teller 2* di KSPPS BMT NU Lumajang:⁹⁴

Jadi *teller* atau bagian pelayanan rutin mengupdate informasi kepada pengawas internal yang dilakukan disetiap akhir jam kerja melalui sistem yang ada di sini. Informasi ini berupa laporan transaksi harian dan laba rugi bulanan yang digunakan untuk mengecek pemasukan dan pengeluaran di BMT setiap harinya.

Dari hasil wawancara tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa *teller* bertanggungjawab dalam mengupdate informasi keuangan kepada pengawas internal yang dilakukan setiap hari di akhir jam kerja. Informasinya berupa laporan transaksi harian atau neraca harian dan laporan laba rugi bulanan KSPPS BMT NU Lumajang.

Pemaparan beberapa hasil penelitian di atas dapat kesimpulan pada KSPPS BMT NU Lumajang dalam pencatatan keuangan baik pemasukan atau pengeluaran sudah menggunakan sistem. Sehingga, transaksi-transaksi yang terjadi langsung di input ke sistem dan akan otomatis terakumulasi dengan data keuangan sebelumnya. *Teller* atau bagian pelayanan bertanggungjawab untuk memberikan informasi terbaru setiap harinya kepada pengawas internal. Oleh karena itu, di setiap akhir jam kerja *teller* atau bagian pelayanan rutin mengupdate informasi berupa laporan transaksi harian atau neraca harian dan laporan laba rugi bulanan KSPPS BMT NU Lumajang.

⁹⁴ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

b. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi artinya terbuka atas segala informasi kepada publik untuk mengakses data yang ada di badan publik. Dengan memudahkan pengguna informasi dalam mengakses informasi tentunya akan berdampak positif untuk sebuah unit usaha. Dampak positifnya, unit usaha tersebut mendapatkan kepercayaan lebih dari publik. Selain itu, dengan keterbukaan informasi ini dapat mengukur kinerja dan mengurangi tingkat terjadinya kecurangan atau penyimpangan yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang yang mengungkapkan bahwa:⁹⁵

Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dalam penyampaian informasi kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi yang akurat dan jelas juga sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk kemudahan mendapatkan informasi itu bisa dengan datang langsung ke BMT. Disitu kami akan memberikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi yang akurat dan jelas sesuai dengan kejadian yang terjadi di KSPPS BMT NU Lumajang. Agar mudah mendapatkan informasi, karyawan KSPPS BMT NU Lumajang lebih menganjurkan untuk datang langsung ke KSPPS BMT NU Lumajang.

⁹⁵ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

Dengan keterbukaan informasi ini selain mendapatkan kepercayaan publik juga bisa mendorong terjalannya komunikasi yang lebih baik antara karyawan KSPPS BMT NU Lumajang dengan masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan oleh KSPPS BMT NU Lumajang, keterbukaan informasinya melalui penyampaian informasi yang dibutuhkan secara tatap muka. Dengan begitu, informasi yang didapat oleh masyarakat lebih jelas dan akurat. Keterbukaan informasi ini sangat penting untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terutama lembaga keuangan. Karena dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat lebih yakin untuk menggunakan produk-produk yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller* 1 KSPPS BMT NU Lumajang yang mengungkapkan bahwa:⁹⁶

Untuk keterbukaan informasi tentunya kami akan memberikan informasi yang jelas dan akurat. Memudahkan mereka yang membutuhkan informasi dalam mendapatkan informasi. Informasi yang kami berikan pastinya tidak ada yang kami tutup-tutupi selagi informasi yang diminta itu informasi yang wajar.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang akan memberikan informasi yang jelas dan akurat selama informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang wajar.

Masyarakat atau publik memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Keterbukaan informasi ini berarti mudah

⁹⁶ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

dalam mengakses informasi oleh semua pihak yang membutuhkan dan sifatnya terbuka. Artinya, informasinya transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Informasi dari suatu lembaga akan mudah diakses apabila informasi tersebut bukan informasi yang sifatnya rahasia perusahaan. Apabila termasuk rahasia perusahaan, pihak eksternal tidak diberikan akses untuk mendapatkan informasi tersebut.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki selaku *Teller 2* KSPPS BMT NU Lumajang:⁹⁷

Anggota maupun calon anggota punya hak untuk mendapatkan informasi. Selagi informasi yang dibutuhkan itu wajar kami akan mengusahakan untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Karena ada informasi yang sifatnya rahasia perusahaan. Untuk informasi yang sifatnya rahasia ini kami saja selaku karyawan di sini tidak punya hak untuk memberikan informasi tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa publik punya hak dalam mendapatkan informasi. Informasi perusahaan ada informasi yang bersifat rahasia artinya tidak semua orang bisa mengakses informasi tersebut. Karyawan KSPPS BMT NU Lumajang juga tidak memiliki akses dalam memberikan informasi yang sifatnya rahasia tersebut.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai Bapak Abdul Gofar selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:⁹⁸

Setau saya untuk mendapatkan informasi disini itu untuk nasabah seperti saya bisa dengan datang langsung kesini atau bisa melalui Pak Fendi selaku bagian lapangan. Kalo saya

⁹⁷ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

⁹⁸ Abdul Gofar, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

biasanya datang langsung kesini, jadi informasinya bisa lebih jelas karena langsung dijelaskan oleh teller yang ada disini sesuai dengan data yang ada di komputernya.

Maksud dari pernyataan Bapak Abdul Gofar di atas ialah untuk mendapatkan informasi baik mengenai simpanan atau pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah bisa dengan datang langsung ke kantor KSPPS BMT NU Lumajang atau melalui *funding officer*. Untuk lebih jelasnya bisa dengan datang langsung ke kantor karena *teller* akan menjelaskan sesuai dengan data yang ada di sistem yang digunakan KSPPS BMT NU Lumajang.

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Lumajang terbuka dalam menyampaikan informasi. Penyampaian informasi tersebut bisa melalui datang langsung ke kantor KSPPS BMT NU Lumajang atau melalui Pak Fendi selaku *funding officer*.

Lalu dilanjutkan wawancara dengan Ibu Riska selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:⁹⁹

Biasanya saya kalo menabung itu dititipkan ke Pak Fendi mbak, saya tidak pernah datang langsung ke kantornya. Jadi, biasanya informasi seperti jumlah tabungan saya sekarang itu saya tahunya dari buku tabungan itu. Disitu sudah tercatat semua jumlah tabungan saya, berapa uang yang saya tabungkan dan kapan saya menabung itu tercatat semua.

Maksud dari pernyataan nasabah tersebut ialah penyampaian informasi baik mengenai simpanan atau pembiayaan itu bisa dilihat pada buku tabungan yang dimiliki. Pada buku tabungan tersebut

⁹⁹ Riska, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

tercatat semua transaksi-transaksi atau aktivitas-aktivitas yang terjadi, baik tabungan atau pun pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang menabung melalui *funding officer* akan mendapatkan informasi misal mengenai jumlah tabungannya melalui buku tabungan yang dimiliki. Karena tidak datang langsung ke kantor KSPPS BMT NU Lumajang, *funding officer*lah yang bertugas menyampaikan informasi kepada nasabah apabila ada informasi yang perlu untuk diketahui oleh nasabah.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Lasmi selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang.¹⁰⁰

“Ketika saya mau menabung saya datang langsung ke sini mbak. Setelah diproses nanti *teller* akan memberitahu saya jumlah tabungan saya berapa atau bagi hasil yang saya dapat bulan ini berapa gitu mbak.”

Maksud dari pernyataan Ibu Lasmi tersebut adalah ketika beliau mau menabung beliau akan datang langsung ke kantor KSPPS BMT NU Lumajang dan setelah tabungan Bu Lasmi tersebut di proses *teller* akan menjelaskan mengenai jumlah tabungan dan bagi hasil yang didapat beliau di bulan tersebut.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *teller* akan menyampaikan informasi mengenai simpanan atau tabungan yang dimiliki nasabah sesuai dengan data yang ada di sistem dan telah di cetak di buku tabungan yang ada. Informasi yang disampaikan bisa

¹⁰⁰ Lasmi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

tentang bagi hasil yang di dapat oleh nasabah pada bulan itu, jumlah tabungan nasabah saat itu atau jumlah angsuran pembiayaan yang masih harus dibayarkan oleh nasabah.

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat kesimpulan karyawan KSPPS BMT NU Lumajang memberikan informasi sesuai dengan aktifitas yang terjadi di KSPPS BMT NU Lumajang. Agar mendapatkan informasi yang akurat dan lebih jelas, KSPPS BMT NU Lumajang menganjurkan agar datang langsung ke kantor. Selama informasi yang diminta bukan informasi yang bersifat rahasia perusahaan, pihak KSPPS BMT NU Lumajang akan memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan didefinisikan sebagai pengungkapan informasi kepada masyarakat atau publik tentang aktifitas dan kinerja keuangan sebuah organisasi. Pengungkapan informasi kepada publik harus dilakukan karena dengan adanya pengungkapan informasi ini dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan organisasi.

Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang:¹⁰¹

Penyampaian informasi kepada publik itu seperti pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Disana kami bertanggungjawab untuk menyampaikan bagaimana aktifitas dan kinerja keuangan BMT selama satu periode seperti kondisi keuangan, susunan pengurus, perencanaan untuk periode tahun

¹⁰¹ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

berikutnya dan juga hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan selama satu periode.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi KSPPS BMT NU Lumajang mengenai aktifitas dan kinerja keuangan baik informasi kondisi keuangan, susunan pengurus, perencanaan untuk periode berikutnya dan hasil yang didapat KSPPS BMT NU Lumajang selama satu periode disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik.

Pengungkapan informasi ini berarti penyampaian informasi mengenai suatu lembaga dalam satu periode. Informasi yang diungkapkan berupa laporan keuangan yang berisi perincian pengeluaran dan pemasukan. Selain itu, mengenai kondisi keuangan sebuah lembaga keuangan. Dengan pengungkapan informasi ini juga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengungkapan informasi ini sangat perlu untuk dilakukan.

Kemudian peneliti lanjut wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller 1* KSPPS BMT NU Lumajang:¹⁰²

Kalau penyampaian informasi tentang kondisi keuangan dan perencanaan untuk tahun berikutnya kepada publik itu kami lakukan pada saat RAT. Meskipun sebenarnya kami itu tidak wajib melakukan RAT karena masih koperasi baru. Jadi, koperasi yang wajib RAT itu ya koperasi yang sudah tiga tahun berdiri atau tiga kali RAT. Sedangkan kami berusaha selalu melakukan RAT setiap tahunnya meskipun sebenarnya tidak wajib.

¹⁰² Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Lumajang menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan perencanaan untuk tahun berikutnya kepada publik melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Karena KSPPS BMT NU Lumajang masih tergolong koperasi baru, tidak diwajibkan untuk melaksanakan RAT. Syarat sebuah koperasi wajib melaksanakan RAT adalah koperasi yang sudah tiga tahun berdiri atau tiga kali RAT. Namun, KSPPS BMT NU Lumajang berusaha untuk tetap melakukan RAT setiap tahunnya.

Pada lembaga keuangan seperti KSPPS BMT NU Lumajang ini pengungkapan informasi bisa dilakukan dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pada RAT ini pihak KSPPS BMT NU Lumajang menyampaikan mengenai laporan keuangan selama satu periode. Laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban KSPPS BMT NU Lumajang ini berisi mengenai kondisi keuangan baik pengeluaran atau pemasukan. Selain itu juga menjelaskan mengenai perkembangan modal yang dimiliki KSPPS BMT NU Lumajang. Melalui RAT ini penyampaian informasi disampaikan dengan jelas dan rinci dan tersedia dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) KSPPS BMT NU Lumajang.

Dilanjut wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki selaku *Teller* 2 KSPPS BMT NU Lumajang:¹⁰³

¹⁰³ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

Dari tahun pertama BMT NU ini berdiri dari pihak pengurus mewajibkan kami untuk melakukan RAT. Meskipun sebenarnya tidak wajib RAT untuk koperasi baru. Tapi dengan adanya RAT ini kami bisa menyampaikan informasi berupa kondisi keuangannya BMT selama satu periode, kemudian susunan kepengurusannya, dan juga tentang rencana untuk tahun berikutnya serta hasil aktifitas dan kinerja kami selama satu periode sebelumnya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun pertama berdirinya KSPPS BMT NU Lumajang, pengurus mengharuskan KSPPS BMT NU Lumajang untuk melaksanakan RAT. Meskipun untuk koperasi baru tidak wajib melaksanakannya. Keuntungan dari melaksanakan RAT ini pihak KSPPS BMT NU Lumajang bisa transparansi terhadap publik mengenai kondisi keuangan, susunan pengurus, dan lain sebagainya.

Setelah itu peneliti mewawancarai Bapak Abdul Gofar selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang.¹⁰⁴

“Biasanya di akhir tahun tutup buku itu ada rapat mbak. Disana disampaikan keuangan BMT saat itu gimana, susunan kepengurusannya, dan rencana-rencana berikutnya.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi kepada publik dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan rutin oleh KSPPS BMT NU Lumajang.

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat kesimpulan penyampaian informasi KSPPS BMT NU Lumajang kepada publik mengenai aktifitas dan kinerjanya selama satu periode itu melalui

¹⁰⁴ Abdul Gofar, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT ini dilakukan rutin di akhir periode. Informasi yang disampaikan pada saat RAT ini seperti informasi mengenai keuangan, susunan pengurus, perencanaan dan hasil yang didapat selama satu periode sebelumnya. Sebenarnya KSPPS BMT NU Lumajang ini belum wajib melakukan RAT karena masih tergolong koperasi baru. Namun, pengurus mewajibkan pelaksanaan RAT tersebut agar tetap bisa menjaga kepercayaan yang sudah diberikan publik kepada KSPPS BMT NU Lumajang.

Transparansi sangatlah penting bagi sebuah unit usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu transparansi juga dapat memudahkan pengelolaan organisasi karena tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Transparansi memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam mengakses informasi. Jika sudah menerapkan transparansi maka bisa dikatakan sudah melaksanakan nilai kejujuran di dalam aktifitas-aktifitas sebuah organisasi. Pelaksanaan transparansi ini memiliki tujuan dan manfaat bagi sebuah organisasi tentunya.

Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang mengungkapkan bahwa:¹⁰⁵

“Transparansi ini supaya terjalin komunikasi yang baik antara *stakeholder* dengan pihak koperasi dan juga mendapatkan kepercayaan publik kepada koperasi. Manfaatnya bisa menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik kepada kami.”

¹⁰⁵ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari transparansi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Lumajang agar terjalin komunikasi yang baik antara *stakeholder* dengan pihak koperasi serta mendapatkan kepercayaan publik. Manfaat yang didapat ialah menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik kepada KSPPS BMT NU Lumajang.

Penerapan prinsip transparansi pada KSPPS BMT NU Lumajang sudah pasti memiliki tujuan. Tujuan umum dari penerapan transparansi ini ialah untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Karena dengan kepercayaan dari publik ini memberikan dampak positif kepada KSPPS BMT NU Lumajang. Seperti dalam pemanfaatan produk-produk yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang. Semakin banyak kepercayaan yang diberikan publik maka semakin banyak pula pemanfaatan produk-produk KSPPS BMT NU Lumajang.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller* 1 KSPPS BMT NU Lumajang.¹⁰⁶

Pastinya untuk mendapatkan kepercayaan dari publik ya. Selain itu, agar tidak terjadi kecurangan dalam pengambilan keputusan. Manfaatnya dengan mendapatkan kepercayaan dari publik akan membuat banyak pihak yang tertarik dan mau untuk menggunakan produk-produk dari BMT ini. Entah itu produk simpanan ataupun pembiayaan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari transparansi KSPPS BMT NU Lumajang ialah untuk mendapatkan kepercayaan dari publik dan agar tidak terjadi kecurangan dalam

¹⁰⁶ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

pengambilan keputusan. Manfaatnya ialah dengan adanya kepercayaan publik akan menarik minat banyak pihak untuk menggunakan produk-produk yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang baik produk simpanan atau pembiayaan.

Oleh karena itu, transparansi ini sangat perlu untuk diterapkan dalam sebuah organisasi. Keterbukaan informasi sangat diperlukan oleh publik yang dimana untuk saat ini dalam penyampaian informasi sudah banyak cara. Salah satunya dengan transparansi melalui sosial media juga membantu penyampaian informasi dengan cepat. Dalam pengambilan keputusan juga diperlukan transparansi organisasi. Selain itu juga bermanfaat untuk keberlangsungan sebuah lembaga keuangan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki selaku *Teller 2* KSPPS BMT NU Lumajang:¹⁰⁷

Tujuan umumnya itu untuk mendapatkan kepercayaan, selain itu dengan transparansi memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Manfaatnya untuk keberlangsungan BMT ini akan mendorong BMT untuk terus berkembang dengan baik dan memberikan pelayanan informasi yang terbaik.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan umum transparansi KSPPS BMT NU Lumajang ialah agar mendapatkan kepercayaan publik. Selain itu dapat memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Manfaat yang didapat KSPPS BMT NU Lumajang yaitu mendorong KSPPS

¹⁰⁷ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

BMT NU Lumajang untuk terus berkembang dengan baik dan memberikan pelayanan informasi terbaik.

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan tujuan transparansi KSPPS BMT NU Lumajang ialah agar terjalin komunikasi yang baik antara *stakeholder* dan koperasi serta mendapatkan kepercayaan dari publik. Selain itu dengan transparansi juga dapat memudahkan pengurus dalam mengambil keputusan. Penerapan transparansi ini dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik kepada koperasi. Dengan kepercayaan ini dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan produk-produk yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang. Produk-produk KSPPS BMT NU Lumajang ini berupa simpanan dan pembiayaan.

Dalam penerapan transparansi diperlukan pengukuran agar mengetahui tingkat penerapannya. Transparansi memiliki beberapa indikator dalam penerapannya, meliputi:

a. Kemudahan mengakses informasi

Maksud dari kemudahan mengakses informasi adalah pihak koperasi memudahkan pengguna informasi atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi untuk mengakses informasi. Kemudahan mengakses informasi ini bisa dengan memberikan layanan langsung di setiap jam kerja atau dengan menyediakan *website* khusus untuk memudahkan mengakses informasi.

Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang:¹⁰⁸

Sudah pasti kita memudahkan siapa saja yang membutuhkan informasi baik itu penabung atau pihak ketiga dalam mendapatkan informasi. Kami berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan dengan baik secara langsung di setiap jam kerja. Untuk web kami belum ada, sekarang kami masih memanfaatkan media sosial saja, seperti *Facebook* dan *Instagram*.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Lumajang memudahkan siapa saja yang membutuhkan informasi baik itu penabung atau pihak ketiga dalam mendapatkan informasi. Karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dengan baik secara langsung di jam kerja. Untuk *website* khusus KSPPS BMT NU Lumajang belum ada. Saat ini masih memanfaatkan sosial media saja seperti *Facebook* dan *Instagram*.

Kemudahan dalam mengakses informasi sangat berpengaruh terhadap kepercayaan yang diberikan oleh publik. Karena apabila pihak KSPPS BMT NU Lumajang sudah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentu masyarakat tidak akan merasa ragu untuk menggunakan produk-produk yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang. Dengan kemudahan mengakses informasi ini masyarakat merasa yakin untuk menabungkan uangnya ke KSPPS BMT NU Lumajang. Dan

¹⁰⁸ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

tentunya akan lebih percaya dalam pemanfaatan produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU Lumajang sudah disepakati bersama.

Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller 1* KSPP BMT NU Lumajang:¹⁰⁹

Untuk web BMT sendiri kami belum ada. Sekarang kan eranya media sosial ya, jadi kami memanfaatkan media sosial itu saja. BMT baru punya media sosial seperti, *Facebook* dan *Instagram* sekarang. Selain itu, ada *funding officer* atau bagian penghimpun dana. Nah, bagian ini biasanya juga yang memberikan informasi kepada penabung yang menabung melalui *funding officer* atau tidak datang langsung ke kantor.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Lumajang belum menyediakan *website* khusus. Untuk saat ini hanya memanfaatkan media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*. Selain itu, KSPPS BMT NU Lumajang juga menyediakan bagian *funding officer* atau penghimpun dana untuk memudahkan baik penabung atau calon penabung untuk mendapatkan informasi.

Selain melalui tatap muka, kemudahan dalam mengakses informasi juga dapat melalui internet. Penyediaan *website* sangat diperlukan saat ini. Karena dengan *website* yang bisa diakses oleh publik juga akan memudahkan informasi tersebar luaskan. Di era sekarang yang serba teknologi, adanya *website* sangat membantu

¹⁰⁹ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023

penyampaian informasi. Selain *website*, bisa juga melalui media sosial yang sangat berkembang pesat saat ini.

Kemudian dilanjut wawancara dengan Ahmad Muzakki selaku *Teller 2* KSPPS BMT NU Lumajang:¹¹⁰

Seperti yang mbak tahu ya, BMT ini belum memiliki *website* yang menyediakan informasi mengenai BMT. Kami berusaha memberikan pelayanan langsung dengan baik setiap di jam kerja. Informasi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan menabung atau akan melakukan pinjaman juga penabung atau pihak ketiga yang sedang membutuhkan informasi. Misal, pihak ketiga yang ingin tahu informasi berapa kali angsuran lagi untuk melunasi angsurannya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa belum adanya *website* khusus KSPPS BMT NU Lumajang. Oleh karena itu, KSPPS BMT NU Lumajang memaksimalkan dalam pemberian layanan secara langsung pada jam kerja. Informasi apapun yang dibutuhkan akan diberikan pelayanan dengan baik.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak Abdul Gofar selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹¹¹

BMT ini belum memiliki *website* mbak setau saya, jadi untuk nasabah itu tidak bisa tahu update informasi BMT jika tidak datang langsung kesini. Kalo dari informasi yang saya tau, BMT ini juga punya media sosial mbak tapi saya tidak mengikuti perkembangan informasi yang ada di sosial media.

Dilanjutkan dengan mewawancarai Ibu Riska selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹¹²

¹¹⁰ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

¹¹¹ Abdul Gofar, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

¹¹² Riska, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

“BMT ini punya akun media sosial mbak, tapi di *facebook* itu tidak ada informasi penting yang di *update* jadi kami tidak tahu informasi terbaru dari BMT. Jadi saya atau nasabah lain harus datang langsung ke kantor kalau ada informasi yang saya butuhkan”

Maksud dari pernyataan Bapak Abdul Gofar tersebut KSPPS BMT NU Lumajang memiliki media sosial namun kurang dimanfaatkan dengan baik. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan haruslah datang ke kantor KSPPS BMT NU Lumajang.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Lasmi selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹¹³

“Untuk mendapatkan informasi itu memang harus datang langsung ke kantor BMT atau bisa melalui Pak Fendi ini mbak. Kalo untuk sosial media itu saya kurang tau mbak.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai KSPPS BMT NU Lumajang bisa dengan datang langsung ke kantor BMT atau bisa melalui Pak Fendi selaku *funding officer*.

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat kesimpulan pada KSPPS BMT NU Lumajang ini belum tersedia *website* khusus untuk memberikan informasi mengenai perkembangan KSPPS BMT NU Lumajang. Pemberian informasi secara langsung atau tatap muka pada saat jam kerja KSPPS BMT NU Lumajang menjadi salah satu cara yang efektif untuk saat ini.

¹¹³ Lasmi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

Namun, selain itu KSPPS BMT NU Lumajang juga menyediakan bagian *funding officer* atau penghimpun dana dalam pemberian informasi kepada penabung, calon penabung, atau pihak ketiga yang tidak datang langsung ke kantor KSPPS BMT NU Lumajang. Selain itu, KSPPS BMT NU Lumajang sudah memanfaatkan adanya perkembangan teknologi saat ini yaitu sosial media. Sosial media yang sudah dimiliki KSPPS BMT NU Lumajang ini seperti *Instagram*, dan *Facebook*.

b. Ketersediaan informasi

Ketersediaan informasi ini maksudnya pihak koperasi menyediakan informasi baik berupa pamflet yang diberikan kepada masyarakat yang datang berkunjung atau melakukan sosialisasi. Selain itu, bisa dengan memanfaatkan media sosial karena perkembangan informasi bisa dengan mudah tersampaikan.

Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang:¹¹⁴

Diawal crew diterjunkan ke lapangan karena BMT NU ini miliknya NU maka fokuskan untuk warga Nahdliyin dulu. Setelah itu dilanjutkan ke lembaga-lembaga baik ditingkat PCNU maupun MWCNU. Jadi untuk perkembangannya cepat soalnya kita masuknya melalui perkumpulan-perkumpulan bukan perseorangan. Misal ketika ada kegiatan di MWC Senduro, kita hadir untuk sosialisasilah kalo PCNU sekarang sudah punya lembaga keuangan sendiri yang asli punya NU yang ada di Lumajang. Selain itu, kita juga memanfaatkan sosial media yang ada saat ini. Sekarang kalo kita mengandalkan terjun langsung sudah bisa dibilang kurang efektif karena ada sosial media

¹¹⁴ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

yang lebih efektif dan tentunya informasi akan lebih cepat tersebar luaskan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa diawal berdirinya KSPPS BMT NU Lumajang, semua karyawan BMT diterjunkan ke lapangan. Karena KSPPS BMT NU Lumajang ini miliknya Nahdlatul Ulama (NU) fokus utamanya yaitu masyarakat Nahdliyin. Setelah itu, dilanjutkan ke lembaga-lembaga ditingkat PCNU ataupun MWCNU. Sehingga penyampaian informasinya cepat, karena melalui perkumpulan-perkumpulan terlebih dahulu. Selain itu, memanfaatkan adanya media sosial karena apabila megandalkan terjun langsung ke lapangan sudah kurang efektif. Dengan adanya media sosial ini juga informasi bisa lebih cepat tersebar luaskan.

Untuk menambah pengetahuan mengenai KSPPS BMT NU Lumajang sudah disediakan brosur yang tentunya didukung dengan penjelasan dari bagian pelayanan. Selain itu, pemanfaatan media sosial yang diharapkan dapat menyampaikan informasi dengan cepat. Sosialisasi juga dilakukan dalam memberikan informasi dan bisa mendukung informasi cepat tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Pemanfaatan teknologi yang saat ini sedang sangat berkembang, memberikan dampak yang sangat bagus untuk penyampaian informasi. Namun tidak bergantung pada perkembangan teknologi saja, tapi ketersediaan informasi bisa

melalui tatap muka langsung dengan pihak KSPPS BMT NU Lumajang.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller* 1 KSPPS BMT NU Lumajang:¹¹⁵

Di sini kami menyediakan pamflet untuk masyarakat yang datang berkunjung kesini dan kami akan menjelaskan informasi tentang produk simpanan dan pembiayaan yang ada di sini. Selain dengan pamflet, di awal kami terjun langsung ke lapangan dengan mengikuti acara-acara yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan PCNU. Di acara itu kami melakukan sosialisasi. Memberitahukan kalau PCNU sudah punya lembaga keuangan sendiri.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU lumajang menyediakan pamflet atau brosur untuk masyarakat yang datang berkunjung dan bagian pelayanan akan menjelaskan mengenai produk-produk yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang. Selain dengan pamflet, di awal KSPPS BMT NU Lumajang terjun langsung ke lapangan dengan melakukan sosialisasi pada acara-acara lembaga yang ada di bawah naungan NU.

Jika dilihat dari informasi dari KSPPS BMT NU Lumajang belum memanfaatkan sosial media dengan baik. Sebenarnya pemanfaatan sosial media ini akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap KSPPS BMT NU Lumajang. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan mengenal KSPPS BMT

¹¹⁵ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

NU Lumajang, maka semakin banyak pula pihak-pihak yang menggunakan produk-produk KSPPS BMT NU Lumajang. Dengan begitu, akan memberikan keuntungan kepada KSPPS BMT NU Lumajang itu sendiri.

Dilanjut wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki selaku *Teller 2 KSPPS BMT NU Lumajang*:¹¹⁶

Kami menyediakan pamflet di sini, selain itu kami melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan PCNU, seperti MWCNU. Karena sasaran utama kami diawal itu masyarakat Nahdliyin. Selain itu kami juga memanfaatkan media sosial yang ada seperti facebook dan instagram.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Lumajang menyediakan pamflet dan melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan NU. Karena sasaran utama KSPPS BMT NU Lumajang adalah masyarakat Nahdliyin. Selain itu juga memanfaatkan adanya media sosial.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Abdul Gofar selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹¹⁷

“Disini sudah disediakan brosur ya mbak, jadi orang-orang yang datang kesini sambil menunggu proses selesai bisa sambil membaca brosur itu. Dari brosur itu juga kita bisa tahu apa saja yang ada di BMT ini.”

¹¹⁶ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

¹¹⁷ Abdul Gofar, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

Dilanjutkan dengan mewawancarai Ibu Riska selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang.¹¹⁸

“Saya tahu informasi BMT ini dari sosialisasi awalnya, sosialisasi di fatayat. Saat sosialisasi itu dijelaskan kalo BMT ini koperasi baru yang kantor pusatnya ada di gedung PCNU dan produk Nahdlatul Ulama.”

Setelah itu, peneliti mewawancarai Ibu Lasmi selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang.¹¹⁹

“Ketika saya kesini ya mbak sudah tersedia brosur. Di brosur itu ada informasi persyaratan untuk menjadi nasabah atau produk-produk yang ada di BMT ini. Jadi brosur ini membantu kami juga.”

Maksud dari pernyataan Ibu Lasmi tersebut ialah di KSPPS BMT NU Lumajang sudah tersedia brosur yang berisi informasi mengenai KSPPS BMT NU Lumajang.

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan di awal berdirinya KSPPS BMT NU Lumajang, informasi tersedia melalui sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh anggota KSPPS BMT NU Lumajang pada acara-acara yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Karena sasaran utama KSPPS BMT NU Lumajang yakni masyarakat Nahdliyin. Pamflet dan brosur juga disediakan oleh KSPPS BMT NU Lumajang. Penyediaan informasi melalui sosial media juga cukup membantu KSPPS BMT NU Lumajang.

¹¹⁸ Riska, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

¹¹⁹ Lasmi, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

c. Kerahasiaan informasi

Kerahasiaan informasi adalah adanya informasi yang bersifat rahasia dimana informasi tersebut tidak bisa diakses dengan mudah. Informasi yang bersifat rahasia ini seperti laporan keuangan perusahaan. Pihak-pihak yang dapat mengakses informasi seperti ini hanyalah pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Anik Karomah mengungkapkan bahwa:¹²⁰

Memang ada informasi yang sifatnya rahasia perusahaan. Jadi, yang boleh mengakses informasi itu hanya pihak-pihak internal yang berkepentingan. Pihak-pihak eksternal itu tidak punya hak untuk mengakses informasi itu. Misal, jumlah keuangan koperasi.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada informasi yang sifatnya rahasia. Pihak-pihak yang memiliki akses untuk mendapatkan informasi tersebut hanyalah pihak-pihak internal yang berkepentingan. Pihak-pihak eksternal tidak memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut. Informasi yang sifatnya rahasia tersebut seperti jumlah keuangan KSPPS BMT NU Lumajang.

Setiap lembaga keuangan atau perusahaan pasti memiliki informasi yang sifatnya rahasia. Informasi ini tidak boleh disampaikan kepada publik kecuali atas izin dari pengurus. Semua karyawan wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi lembaga

¹²⁰ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

keuangan tersebut. Informasi lembaga keuangan merupakan aset berharga yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Informasi yang dimaksud di sini ialah informasi mengenai laporan keuangan. Apabila informasi tersebut bisa saja terjadi sabotase atau hal-hal yang bisa merugikan lembaga keuangan tersebut.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan *Teller 1* KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Muhabbah mengungkapkan bahwa:¹²¹

Semua instansi atau lembaga apapun pasti memiliki informasi yang sifatnya rahasia. Artinya, informasi tersebut hanya perusahaan atau lembaga itu yang boleh tahu dan untuk mengaksesnya hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja yang boleh. Misal seperti ini ada pihak eskternal yang ingin tahu laporan keuangan BMT itu tidak diberikan hak untuk mengakses itu. Dan saya pun sebagai karyawan tidak mempunyai kuasa untuk memberikannya, kecuali ada izin langsung dan untuk kepentingan tertentu.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa semua lembaga memiliki informasi yang sifatnya rahasia. Artinya, informasi tersebut hanya lembaga tersebut yang boleh tahu dan pihak yang boleh mengakses hanya pihak-pihak internal yang berkepentingan saja, seperti informasi mengenai laporan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang. Karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang pun tidak diberikan akses untuk memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal lembaga.

¹²¹ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

Seperti lembaga keuangan yang lain, KSPPS BMT NU Lumajang memiliki informasi yang sifatnya rahasia. Informasi tersebut sangat dijaga kerahasiaannya. Hanya untuk kepentingan tertentu dan memang diberikan akses oleh pengurus untuk mengaksesnya. Pengungkapan informasi tersebut dapat dilakukan apabila untuk kepentingan tertentu dan atas izin dari pengurus. Mematuhi kebijakan untuk menjaga kerahasiaan informasi merupakan salah satu bentuk profesionalitas seseorang dalam bekerja.

Setelah itu, dilanjut wawancara dengan *Teller 2* KSPPS BMT NU Lumajang, Bapak Ahmad Muzakki yang mengungkapkan bahwa:¹²²

Laporan keuangan itu informasi yang sifatnya rahasia. Di sini pun yang boleh mengakses laporan keuangan BMT hanya pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pengurus. Kami di sini pun tidak diberikan wewenang untuk memberikannya, kecuali untuk kepentingan tertentu.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang sifatnya rahasia itu seperti laporan keuangan. Di KSPPS BMT NU Lumajang yang diperbolehkan mengakses laporan keuangan hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja. Karyawan di KSPPS BMT NU Lumajang tidak memiliki wewenang untuk memberikan laporan keuangan kepada

¹²² Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

stakeholder apabila tidak mendapatkan perintah langsung dari pengurus.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Abdul Gofar selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹²³

“Mungkin informasi laporan keuangan atau kalau tidak informasi data pribadi nasabah yang tidak bisa diakses oleh orang lain.”

Maksud dari pernyataan Bapak Abdul Gofar tersebut ialah informasi yang menjadi informasi rahasia ialah informasi laporan keuangan atau informasi data pribadi nasabah lain.

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Riska selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:

“Informasi yang termasuk rahasia ya seperti data diri nasabah atau data keuangan nasabah lain.”

Maksud dari pernyataan Ibu Riska tersebut ialah data diri nasabah yang tidak bisa sembarangan orang untuk mengakses tersebut dan juga data keuangan koperasi.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informasi perusahaan yang sifatnya rahasia itu laporan keuangan dan data diri nasabah.

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat kesimpulan pada KSPPS BMT NU Lumajang terdapat informasi yang sifatnya rahasia. Informasi yang sifatnya rahasia ini seperti laporan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang. Tidak semua pihak

¹²³ Abdul Gofar, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023

memiliki kuasa untuk mengakses informasi tersebut. Karyawan KSPPS BMT NU Lumajang tidak memiliki wewenang untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak internal yang memiliki kuasa untuk mengakses informasi tersebut seperti pengurus KSPPS BMT NU Lumajang.

Dari observasi yang saya lakukan ketika penelitian, contoh transparansi kepada pengurus mengenai laporan harian keuangan KSPPS BMT NU Lumajang yang dilakukan oleh bagian pelayanan di akhir jam kerja.

Dari pemaparan hasil wawancara dan observasi di atas penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sudah diterapkan dengan baik. Bisa dilihat dari pencatatan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang yang sudah menggunakan sistem baik pencatatan untuk pemasukan ataupun pengeluaran. Di akhir jam kerja bagian pelayanan atau *teller* bertanggungjawab untuk mengupdate informasi laporan keuangan berupa neraca harian dan laba rugi bulanan. Selain itu, dalam keterbukaan informasi KSPPS BMT NU Lumajang berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi yang *terupdate* sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dalam pengungkapan informasi kepada publik dilakukan KSPPS BMT NU Lumajang dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pada saat RAT tersebut KSPPS BMT NU

Lumajang bertanggungjawab untuk menyampaikan mengenai aktifitas dan kinerja keuangan selama satu periode. Karena KSPPS BMT NU Lumajang tergolong koperasi baru belum diwajibkan untuk melaksanakan RAT, namun pengurus tetap mengusahakan untuk melaksanakan RAT tersebut secara rutin.

Tujuan dari penerapan transparansi ini ialah agar terjalin komunikasi yang baik antara pihak KSPPS BMT NU Lumajang dengan *stakeholder*. Selain itu, untuk mendapatkan kepercayaan publik dan agar tidak terjadi kecurangan dalam pengambilan keputusan. Dari penerapan transparansi ini ada manfaat yang didapat oleh KSPPS BMT NU Lumajang, seperti dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik kepada KSPPS BMT NU Lumajang. Dengan kepercayaan tersebut akan menarik minat publik untuk menggunakan produk-produk yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang. Selain itu, mendorong KSPPS BMT NU Lumajang untuk berkembang ke arah yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Pihak KSPPS BMT NU Lumajang memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, terlebih melalui tatap muka langsung atau datang langsung ke kantor KSPPS BMT NU Lumajang pada saat jam kerja. Namun, KSPPS BMT NU Lumajang belum memiliki *website* khusus untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai KSPPS BMT NU Lumajang.

Untuk saat ini hanya memanfaatkan sosial media saja seperti facebook dan instagram. Di awal berdirinya KSPPS BMT NU Lumajang, pengurus menerjunkan langsung karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang untuk sosialisasi ke lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) seperti PCNU dan MWCNU. Selain itu juga memanfaatkan adanya sosial media yang sangat berkembang pesat saat ini dan juga menyediakan pamflet atau brosur.

Sama halnya dengan lembaga-lembaga lain, KSPPS BMT NU Lumajang memiliki informasi yang sifatnya rahasia, seperti laporan keuangan. Pihak yang memiliki akses dalam mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan ini pihak-pihak pengurus dan pihak-pihak yang memang berkepentingan. Karyawan KSPPS BMT NU Lumajang tidak diberikan akses untuk memberikan informasi yang sifatnya rahasia perusahaan kepada pihak-pihak eksternal.

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam aktifitas atau kinerja sebuah organisasi wajib untuk mempertanggungjawabkan semua kinerjanya kepada publik. Oleh karena itu, landasan utama dalam penyelenggaraan sebuah organisasi yang baik ialah akuntabilitas. Dimana pihak pemegang amanah bertanggungjawab dalam menyajikan,

melaporkan dan mengungkapkan semua aktifitas atau kinerja organisasi. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang dalam mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai visi dan misi suatu organisasi. Akuntabilitas ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses mencapai visi dan misi perusahaan. Akuntabilitas memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

a. Integritas keuangan

Sebuah laporan keuangan bisa dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan itu relevan dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan adalah laporan keuangan yang dalam penyajiannya dilakukan dengan jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hasil wawancara dengan pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Anik Karomah yang mengungkapkan bahwa:¹²⁴

Seperti yang sudah saya bilang tadi, semua transaksi yang ada baik simpanan ataupun pembiayaan langsung kami input ke sistem yang ada di sini. Semua transaksi yang terjadi pada hari itu sudah pasti terinput semua dan tercatat didalam neraca harian dan juga berpengaruh di neraca bulanan dan laba rugi.

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa transaksi-transaksi yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang pencatatannya sudah menggunakan sistem. Transaksi-transaksi tersebut sudah pasti terinput dan tercatat dalam neraca harian serta berpengaruh pada neraca bulanan dan laba rugi.

¹²⁴ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

Pada sebuah lembaga atau perusahaan sangat diperlukan kejujuran dalam segala aktifitas yang terjadi. Terutama dalam pencatatan keuangan diperlukan kejujuran dan kebenaran dalam penyajiannya. Karena laporan keuangan yang berintegritas sudah pasti relevan. Meskipun sudah ada peraturan mengenai integritas laporan keuangan masih ada saja kasus manipulasi yang terjadi. Sehingga sangat diperlukan untuk menjaga tingkat integritas laporan keuangan.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan *Teller 1* KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Muhabbah yang mengungkapkan bahwa:¹²⁵

Jadi, transaksi-transaksi yang terjadi kami input ke sistem pada hari yang sama baik itu pemasukan atau pengeluaran BMT. Misal, ada pihak ketiga yang membayar angsuran pasti akan langsung kami proses dan input ke sistem sesuai dengan nominal yang masuk. Setelah itu sistem akan mengakumulasikannya di dalam neraca harian. Kemudian, kami diakhir jam kerja juga bertanggungjawab mengecek pergerakan yang ada di neraca harian dan laba rugi.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi-transaksi yang terjadi diinput ke sistem dan sistem akan memrosesnya langsung. Di akhir jam kerja *teller* bertanggungjawab mengecek ulang neraca harian dan laba rugi sebelum dikirim ke pegawai internal.

Semakin baik tingkat integritas sebuah laporan keuangan menunjukkan bahwa informasi yang disajikan sudah disajikan dengan wajar dan jujur. Apabila laporan keuangan tersebut sudah berintegritas maka informasinya tidak akan menjerumuskan pengguna informasi

¹²⁵ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

tersebut. Laporan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang sudah berintegritas karena dalam pencatatannya dilakukan dengan sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pencatatannya yang sudah menggunakan sistem juga mengurangi tingkat terjadinya manipulasi. Dengan begitu informasi yang disajikan sudah relevan karena disajikan dengan wajar dan jujur.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan *Teller 2* yakni Bapak Ahmad Muzakki yang mengungkapkan bahwa:¹²⁶

Laporan keuangan BMT di sini bisa kami pastikan tidak terjadi manipulasi sama sekali dalam pencatatannya. Karena kami menginput transaksi-transaksi yang terjadi secara langsung. Kami pun sudah menggunakan sistem dalam pencatatannya kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pun sangat sedikit. Berbeda kalau pencatatan keuangannya itu secara manual untuk tingkat kekliruannya sangat tinggi.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pencatatan keuangan yang sudah menggunakan sistem dapat dipastikan tidak terjadi manipulasi karena kemungkinan terjadinya kekeliruan sangat sedikit. Berbeda dengan pencatatan keuangan yang masih manual, untuk tingkat kekeliruannya masih tinggi.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak Abdul Gofar selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹²⁷

“Kemungkinan untuk melakukan kecurangan itu sangat sedikit ya mbak, karena setiap ada yang menabung atau membayar angsuran itu langsung dicatat dikomputer ya ada. Jadi untuk berlaku curang itu kemungkinannya sangat kecil.”

¹²⁶ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

¹²⁷ Abdul Gofar, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Riska selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹²⁸

“Setiap ada yang menabung itu kan langsung di proses ya jadi tidak ada kesempatan untuk karyawan-karyawan ini berlaku curang. Sudah memiliki sistem sendiri juga dalam mencatat datanya.”

Pemaparan beberapa hasil wawancara di atas dapat kesimpulan sistem pencatatan keuangan di KSPPS BMT NU Lumajang sudah menggunakan sistem. Transaksi-transaksi yang terjadi di KSPPS BMT NU Lumajang akan langsung diinput ke sistem oleh *teller*. Transaksi-transaksi tersebut meliputi pemasukan dan pengeluaran KSPPS BMT NU Lumajang. Transaksi yang sudah diinput dan tercatat pada sistem akan berpengaruh pada neraca dan laba rugi bulanan. Sehingga, pada akhir jam kerja *teller* bertanggungjawab untuk mengecek ulang antara neraca harian dan neraca bulanan serta laba rugi bulanan.

b. Pengungkapan

Pengungkapan di sini berisi laporan keuangan yang didesain dan disajikan sebagai gambaran dari seluruh aktifitas organisasi. Laporan keuangan ini berisi informasi keuangan selama satu periode baik itu dari simpanan atau pun pembiayaan. Dengan laporan keuangan ini juga mempermudah pihak koperasi dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya selama satu tahun.

Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah sebagai pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang:¹²⁹

¹²⁸ Riska, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023.

Kita sudah menggunakan sistem untuk pencatatan keuangannya dan sistemnya itu kita ngikut BMT Jombang, karena kita mengacu kesana. Jadi kita tinggal input saja nanti langsung terakumulasi sendiri. Diakhir bulan kita ngecek ada kesalahan atau tidak.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangannya sudah menggunakan sistem dan KSPPS BMT NU Jombang yang menjadi acuannya. Jadi, dari transaksi-transaksi yang terjadi di *input* ke sistem dan akan terakumulasi sendiri oleh sistem. Diakhir bulan dilakukan pengecekan ulang apakah ada kekeliruan atau tidak.

Pengungkapan ini dilakukan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan artinya laporan mengenai aktifitas keuangan selama satu periode. Informasi yang diungkapkan harus jelas, akurat dan dapat dipercaya. Apabila informasinya tidak jelas, akurat dan tidak dapat dipercaya akan menghambat pengambilan keputusan. Dengan pengungkapan ini membantu pihak-pihak yang berkepentingan dengan kepentingan yang tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, pengungkapan ini sangat perlu untuk dilakukan oleh semua lembaga keuangan.

Kemudian dilanjut wawancara dengan Ibu Muhabbah sebagai *Teller* 1 di KSPPS BMT NU Lumajang:¹³⁰

Pencatatan keuangan di sini sudah menggunakan sistem dan dalam pencatatannya sistem pencatatan keuangan dari KSPPS

¹²⁹ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

¹³⁰ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

BMT NU Jombang yang kami jadikan acuan. Jadi, kita mengikuti sistem yang sudah ada dan tinggal input saja. Ketika kita sudah input ada tabungan ataupun ada pembayaran angsuran itu akan langsung terakumulasi dengan sendirinya. Artinya, setiap di akhir bulan kita tinggal ngecek pengeluaran sekarang sekian, pendapatan sekarang sekian, jadi disana itu langsung *tercover* semua.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang yang sudah menggunakan sistem dan laporan keuangan KSPPS BMT NU Jombang yang dijadikan acuan. Jadi, *teller* bisa langsung menginput transaksi yang terjadi dan akan langsung terakumulasi oleh sistem. Diakhir bulan dilakukan pengecekan mengenai pengeluaran dan pendapatan di KSPPS BMT NU Lumajang selamasebulan.

KSPPS BMT NU Lumajang sudah melakukan pengungkapan informasi secara rutin dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap akhir periode. Dengan pengungkapan ini sangat bermanfaat bagi KSPPS BMT NU Lumajang karena dapat memberikan informasi yang membantu masyarakat dalam menilai resiko dan potensial dari KSPPS BMT NU Lumajang. Selain itu, menjadi bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya mengenai perkembangan dari KSPPS BMT NU Lumajang. Perkembangan KSPPS BMT NU Lumajang menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pengelola atau pun *stakeholder*. Perkembangan ini dinilai untuk mengetahui KSPPS BMT NU Lumajang setiap tahunnya

mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik atau malah sebaliknya.

Lalu dilanjut wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki sebagai *Teller 2* di KSPPS BMT NU Lumajang:¹³¹

Kita menggunakan sistem yang sudah ada untuk pencatatan keuangan yang mengacu pada laporan keuangan KSPPS BMT NU Jombang. Jadi, kita tinggal *input* transaksi-transaksi yang ada di sini. Mulai dari *input* pemasukan hingga pengeluaran yang terjadi. Kemudian akan langsung terakumulasi oleh sistem itu. Laporan keuangan tiap perusahaan kan beda ya, nah semisal laporan keuangan untuk Dinas Koperasi kita akan buat laporan sesuai dengan permintaannya. Tapi kita juga punya laporan keuangan versi BMT yang mengacu pada pencatatan laporan keuangan KSPPS BMT NU Jombang.

Kemudian peneliti wawancara dengan Bapak Abdul Gofar selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹³²

“Untuk pencatatanya sudah menggunakan komputer ya sepertinya sudah memiliki sistem pencatatan sendiri. Dari situ juga lebih efektif ya tidak memerlukan waktu yang banyak. Jadi nasabah itu tidak perlu menunggu terlalu lama karena prosesnya cepat.”

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Riska selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹³³

“Di BMT ini memang semua sudah serba komputer ya mbak, tidak ada yang tulis tangan. Jadi ketika ada yang menabung atau membayar angsuran pasti langsung diproses dan tidak perlu menunggu lama.”

Setelah itu peneliti mewawancarai Ibu Lasmi selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹³⁴

¹³¹ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

¹³² Abdul Gofar, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023.

¹³³ Riska, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023.

¹³⁴ Lasmi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023.

“Saya lihat disini sudah menggunakan komputer semua mbak, untuk menghitung uangnya pun sudah menggunakan mesin penghitung jadi untuk kekeliruannya itu sangat sedikit ya mbak. Dan juga mempercepat selesainya proses memasukkan data.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangan di KSPPS BMT NU Lumajang sudah menggunakan sistem dan KSPPS BMT NU Lumajang memiliki laporan keuangan versi BMT sendiri. Namun, biasanya dari pihak Dinas Koperasi ada permintaan sendiri laporan keuangan, sehingga KSPPS BMT NU Lumajang akan membuat laporan keuangan sesuai dengan permintaannya.

c. Ketaatan

Dalam pencatatan keuangan sebuah organisasi harus sesuai dengan peraturan yang ada. Apabila dalam pencatatannya sesuai dengan peraturan berarti bentuk dari ketaatan organisasi tersebut. Pada perusahaan atau lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah wajib mengedepankan prinsip umum akuntansi syariah. Prinsip umum akuntansi syariah ini meliputi keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pencatatan keuangan organisasi harus dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah sebagai pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang:¹³⁵

¹³⁵ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

Sistem yang kami gunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya kalau kami mengacu pada sistem pencatatan keuangan KSPPS BMT NU Jombang yang sudah lebih lama berdiri dan sudah dinyatakan sehat dalam pencatatan keuangannya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan KSPPS BMT NU Lumajang sudah sesuai dengan prinsip syariah karena mengacu pada laporan keuangan KSPPS BMT NU Jombang yang sudah dinyatakan sehat laporan keuangannya.

Ketaatan dalam penyajian laporan keuangan sebuah lembaga keuangan wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Semakin tinggi tingkat ketaatan lembaga keuangan maka semakin baik pula kinerja lembaga keuangan tersebut. Sehingga ketaatan penyajian laporan keuangan terhadap peraturan yang ada bersifat wajib. Apabila dalam penyajian laporan keuangan tidak taat terhadap peraturan yang ada akan mengarah pada kecurangan. Kecurangan yang dimaksud di sini manipulasi penyajian keuangan karena tidak mengikuti aturan penyajian laporan keuangan yang ada.

Kemudian dilanjut wawancara dengan Ibu Muhabbah sebagai *Teller* 1 di KSPPS BMT NU Lumajang:¹³⁶

Karena koperasi syariah, dalam pencatatan keuangan di sini itu kami mengedepankan kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban. Karena kami sudah menggunakan sistem bisa dipastikan informasinya jelas, akurat, informatif dan terhindar dari unsur kecurangan. Pencatatannya pun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹³⁶ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencatatan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang mengedepankan prinsip syariah seperti prinsip kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban. Karena menggunakan sistem informasi dari KSPPS BMT NU Lumajang bisa dipastikan jelas, akurat, informatif, dan terhindar dari kecurangan. Pencatatan keuangannya juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KSPPS BMT NU Lumajang merupakan koperasi syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Penerapan sistem bagi hasil pada produk-produk yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang juga mencerminkan ketaatan KSPPS BMT NU Lumajang terhadap peraturan yang ada. Karena KSPPS BMT NU Lumajang taat terhadap peraturan maka akan semakin baik pula penyajian laporan keuangannya. Apabila sebuah lembaga keuangan taat terhadap peraturan yang ada maka semakin sedikit pula tingkat terjadinya kecurangan.

Lalu dilanjut wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki sebagai *Teller 2* di KSPPS BMT NU Lumajang:¹³⁷

Jadi, BMT itu kan punya laporan keuangan versi BMT sendiri. Kalau dari Dinas Koperasi meminta kami untuk membuat laporan keuangannya sesuai dengan permintaan dari Dinas Koperasi maka kami akan buat. Kami mengikuti permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pencatatannya pun kami tidak keluar dari peraturan pencatatan keuangan yang ada.

¹³⁷ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Lumajang memiliki laporan keuangan versi BMT sendiri. Namun, apabila ada permintaan laporan keuangan dengan format yang berbeda pihak KSPPS BMT NU Lumajang akan membuat. Dalam pencatatannya pun tidak keluar dari ketentuan pencatatan keuangan yang ada.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak Abdul Gofar selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹³⁸

“Menurut saya sudah sesuai dengan syariah ya mbak, jika dilihat di buku tabungan disana terlihat setiap bulannya ada pembagian bagi hasil karena itu salah satu ciri dari koperasi syariah.”

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Riska selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:

Dari penerapan prinsip akuntabilitas pastinya memiliki tujuan dan manfaat bagi semua unit usaha yang menjalankannya. Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang mengungkapkan bahwa:¹³⁹

“Pastinya memiliki tujuan dan manfaat, tujuannya itu supaya mendapat kepercayaan dan bisa menjaga kepercayaan dari publik ataupun pengelola koperasi tersebut. Kalau manfaatnya pastinya terciptanya transparansi organisasi.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari penerapan prinsip akuntabilitas yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT NU Lumajang memiliki tujuan dan pastinya bermanfaat. Akuntabilitas KSPPS BMT NU Lumajang bertujuan agar mendapatkan kepercayaan

¹³⁸ Abdul Gofar, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023.

¹³⁹ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

dan bisa menjaga kepercayaan tersebut. Sedangkan manfaatnya yaitu terciptanya transparansi organisasi.

Penerapan akuntabilitas pasti memiliki tujuan dan manfaat sehingga dijalankan oleh sebuah lembaga keuangan. Tentunya tujuan dan manfaat yang diperoleh berdampak positif terhadap keberlangsungan sebuah lembaga. Dengan akuntabilitas ini juga menunjang perkembangan ke arah yang lebih baik. Sehingga diwajibkan untuk dilaksanakan. Selain itu juga karena akuntabilitas dapat menjadi alat ukur sebuah lembaga sudah transparan atau belum.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller* 2 KSPPS BMT NU Lumajang yang mengungkapkan bahwa:¹⁴⁰

Akuntabilitas itu untuk bahan evaluasi kualitas pelayanan di sini, juga untuk mempertanggungjawabkan semua kinerja kami selama satu periode. Dengan akuntabilitas ini bisa memperbaiki kekurangan dari kualitas kinerja kami dan terciptanya transparansi koperasi.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bertujuan untuk alat evaluasi kualitas pelayanan KSPPS BMT NU Lumajang dan untuk mempertanggungjawabkan semua kinerja KSPPS BMT NU Lumajang selama satu periode. Sedangkan manfaatnya untuk KSPPS BMT NU Lumajang ialah dapat memperbaiki kekurangan dari kualitas kinerja KSPPS BMT NU Lumajang dan terciptanya transparansi koperasi.

¹⁴⁰ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

Penerapan akuntabilitas pada KSPPS BMT NU Lumajang juga beralasan untuk mendapatkan kepercayaan dari publik yang bermanfaat bagi perkembangan KSPPS BMT NU Lumajang. Selain itu, akuntabilitas mendorong KSPPS BMT NU Lumajang agar lebih responsif terhadap kritik dan saran dari publik. Akuntabilitas membantu KSPPS BMT NU Lumajang dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan. Semua pihak yang terlibat dalam sebuah lembaga keuangan berpeluang untuk melakukan penyimpangan. Sehingga sangat diperlukan penerapan akuntabilitas ini untuk meningkatkan kesadaran akan kejujuran.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki selaku *Teller 2* KSPPS BMT NU Lumajang yang mengungkapkan bahwa:¹⁴¹

Pertanggungjawaban itu kami lakukan untuk mempertanggungjawabkan semua aktifitas organisasi yang di amanahkan kepada kami. Dengan mempertanggungjawabkan semuanya yang biasanya dilakukan dengan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini bisa menjaga kepercayaan publik dan lebih responsif terhadap saran dan kritik yang diberikan oleh publik.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntabilitas KSPPS BMT NU Lumajang ialah untuk mempertanggungjawabkan semua aktifitas organisasi yang amanahkan kepada masing-masing bagian yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang. Manfaatnya bisa menjaga kepercayaan publik dan lebih responsif terhadap saran dan kritik yang diberikan oleh publik.

¹⁴¹ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

Penerapan akuntabilitas perlu untuk diukur seberapa baik penerapannya, dengan pengukuran ini bisa diketahui akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik atau belum. Akuntabilitas pada KSPPS BMT NU Lumajang bisa diukur melalui indikator-indikator akuntabilitas sebagai berikut:

a. Perincian tugas dan tanggungjawab

Indikator pertama yakni perincian tugas dan tanggungjawab. Di sini perincian tugas dan tanggungjawab harus sesuai dengan *job desk* yang ada secara jelas dan rinci yang tentunya sesuai dengan visi-misi, target usaha dan strategi perusahaan. Perincian tugas dan tanggungjawab ini tersedia pada Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi semua orang yang memiliki jabatan atau diberikan amanah.

Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang mengungkapkan bahwa:¹⁴²

Perincian tugas dan tanggungjawab itu sudah ada di SOP karyawan disana sudah jelas dan rinci apa saja yang harus dilakukan oleh tiap-tiap bagian. Sejauh ini kami terus berusaha untuk melakukan tugas dan bertanggungjawab akan tugas tersebut sesuai dengan *job desk* yang sudah ada. Selain itu kami juga selalu mengingatkan mengenai *job desk* tiap rapat evaluasi 3 bulan sekali.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perincian tugas dan tanggungjawab sudah ada di SOP karyawan yang tersedia dengan jelas dan rinci. Karyawan-karyawan KSPPS

¹⁴² Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

BMT NU Lumajang berusaha melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan *jobdesk* yang ada. Selain itu, baik dari pihak pengurus atau pun pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang selalu mengingatkan mengenai *jobdesk* pada rapat evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Dengan adanya *jobdesk* yang disajikan secara jelas dan rinci bertujuan agar mempermudah karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Karyawan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan *jobdesk* yang ada sangat menguntungkan karena membantu dalam memaksimalkan pelaksanaan peran yang diamanahkan padanya. Apabila pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian tidak sesuai dengan *jobdesk* yang ada akan berdampak pada pencapaian tujuan. Karena akan mengalami kesulitan dalam pencapaiannya.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller* 1 KSPPS BMT NU Lumajang:¹⁴³

Dari pertama kami diamanahkan untuk menjalankan tugas kami masing-masing, baik dari pengurus dan pimpinan sudah menjelaskan dan selalu mengingatkan dalam menjalankan tugas kami harus berpedoman pada SOP yang ada. Jadi, di SOP itu sudah jelas rincian tugas masing-masing bagian.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari pertama kali diamanahi untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian KSPPS BMT NU Lumajang baik pimpinan ataupun pengurus menjelaskan dan mengingatkan

¹⁴³ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab harus berpedoman pada SOP yang ada. Di dalam SOP tersebut sudah dengan jelas dan rinci semua tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian.

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian dari KSPPS BMT NU Lumajang sesuai dengan SOP. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini sudah dijelaskan secara rinci sejak diawal kontrak. Untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian tetap sesuai dengan *jobdesk* dari pihak pengurus selalu mengingatkan dan menjelaskan kembali mengenai hal tersebut. Biasanya dilakukan pada saat rapat evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Setelah itu dilanjutkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki selaku *Teller 2* KSPPS BMT NU Lumajang yang mengungkapkan bahwa:¹⁴⁴

Jadi tiap-tiap bagian itu memiliki tugas masing-masing kan dan itu sudah disampaikan dan dijelaskan dari awal. Selain itu kami juga sering diingatkan tentang perincian tugas masing-masing dari kami agar tidak menyimpang dari SOP yang ada.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggungjawab yang sudah disampaikan dan dijelaskan dari awal. Selain itu, karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang selalu diingatkan mengenai

¹⁴⁴ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

jobdesk masing-masing bagian agar tidak menyimpang dari SOP yang ada.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Abdul Gofar selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:

Jika dari yang saya lihat ya karyawan-karyawan disini itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Contohnya pada *teller* sudah memberikan pelayanan yang baik, ramah dan sangat membantu ketika ada kebingungan atau ada informasi yang ingin saya tahu kurang lebih begitu.

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Riska selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:

“Karyawan-karyawannya sudah menjalankan tugasnya ya seperti Pak Fendi ini tugas dia terjun langsung ke lapangan ya dijalankan. Datang ke rumah-rumah nasabahnya dan memberikan pelayanan yang baik.”

Setelah itu peneliti mewawancarai Ibu Lasmi selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:

“Kalau dari yang saya lihat ya karyawan disini itu sudah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas-tugasnya. Contohnya saat ada yang menabung itu dilayani dibagian teller.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di KSPPS BMT NU Lumajang sudah cukup baik dan juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan cekatan.

b. Kompetensi yang sesuai

Sebuah organisasi atau perusahaan harus memastikan bahwa seluruh bagian perusahaan bahkan semua karyawan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Selain itu, dengan kompetensi yang sesuai mempermudah dalam menjalankan operasional perusahaan.

Hasil wawancara dengan pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Anik Karomah mengungkapkan bahwa:¹⁴⁵

Pastinya karyawan-karyawan di sini berkompeten pada bidangnya karena tugas-tugas yang diamanahkan kepada mereka itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kami melakukan seleksi dalam perekrutan anggota baru dengan tes tulis, wawancara dan lain sebagainya. Sehingga bisa dipastikan kalau karyawan-karyawan di sini tugas dan tanggungjawabnya sudah sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang bisa dipastikan berkompeten sesuai antara kemampuan yang dimiliki dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Dalam perekrutan anggota baru, KSPPS BMT NU Lumajang melaksanakan seleksi seperti tes tulis, wawancara dan lain sebagainya.

Kesesuaian antara kemampuan dengan jabatan yang diamanahkan kepada masing-masing bagian sangat diperlukan. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki masing-masing bagian akan berpengaruh pada pelaksanaan

¹⁴⁵ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

operasional sebuah lembaga. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut setiap lembaga memiliki kualifikasi sendiri untuk merekrut karyawan-karyawannya sesuai dengan kebutuhan dari lembaga tersebut. Biasanya melalui seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan bagian yang sedang dibutuhkan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan *Teller 1* KSPPS BMT NU Lumajang, Ibu Muhabbah yang mengungkapkan bahwa:¹⁴⁶

Ketika *open recruitment* itu kan disampaikan bagian-bagian yang dibutuhkan saat itu. Kami bisa menjadi bagian dari BMT NU Lumajang ini melalui seleksi yang diikuti oleh puluhan pendaftar. Jadi, bisa dibilang sudah diseleksi ketat oleh pengurus-pengurus. Kalau kemampuan kami tidak sesuai dengan bagian-bagian yang dibutuhkan saat itu pastinya kami tidak akan ada di sini sekarang.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk perekrutan anggota baru KSPPS BMT NU Lumajang melalui seleksi yang diikuti oleh puluhan pendaftar. Sehingga bisa dipastikan dengan melalui seleksi ini, masing-masing bagian KSPPS BMT NU Lumajang sudah sesuai antara kompetensi yang dimiliki dengan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan.

Pada KSPPS BMT NU Lumajang ini perekrutan karyawan dilakukan dengan seleksi yang diselenggarakan oleh KSPPS BMT NU Lumajang tersebut. Dimana seleksi tersebut melalui beberapa

¹⁴⁶ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

tahapan seleksi, seperti tes tulis, wawancara dan lain sebagainya. Seleksi ini pun diikuti oleh cukup banyak pendaftar yang minat untuk bekerja di KSPPS BMT NU Lumajang. Dengan adanya seleksi ini juga membuktikan bahwa karyawan yang bekerja di KSPPS BMT NU Lumajang sesuai antara kompetensi yang dimiliki dengan jabatan yang diamanahkan.

Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan *Teller 2* KSPPS BMT NU Lumajang yang mengungkapkan bahwa:¹⁴⁷

“Perekrutan anggota koperasi di sini itu dilakukan melalui seleksi. Seleksinya melalui tes tulis dan wawancara. Bisa dibilang kemampuan kami sesuai dengan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kami.”

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara kemampuan dengan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada masing-masing bagian sudah bisa dipastikan sesuai karena perekrutannya melalui seleksi yang diselenggarakan oleh KSPPS BMT NU Lumajang.

c. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja ialah proses mengevaluasi kinerja karyawan dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Dengan pengukuran kinerja diharapkan mampu memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan mengamati standar perilaku yang sudah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dirancang untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Apabila karyawan

¹⁴⁷ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

mencapai atau melebihi target perusahaan yang telah ditetapkan maka perusahaan memberikan *feedback* seperti pemberian *reward* atau penghargaan kepada karyawan tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang yang mengungkapkan bahwa:¹⁴⁸

Di bulan Ramadhan kemarin itu kami memberikan reward karyawan yang bisa mencapai target dan bisa mempertahankan tabungan penabung. Semisal, kita biasanya itu dapat Rp.40.000.000 target untuk satu orang. Kalau mencapai target sudah ada persentasenya yang kemudian dikali kan dengan pencapaian target itu. Reward yang diberikan ini berupa nominal.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di KSPPS BMT NU Lumajang ada sistem *reward* untuk karyawan yang bisa mencapai target dan bisa mempertahankan tabungan penabung di bulan Ramadhan. Reward yang diberikan berupa nominal uang.

Pengukuran kinerja ini sangat bermanfaat bagi *stakeholder*, pengurus, dan lainnya karena dapat dijadikan motivasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja ini sebagai alat ukur untuk pelaksanaan semua kegiatan sesuai dengan perencanaan. Pengukuran kinerja ini juga sebagai bahan evaluasi masing-masing karyawan untuk periode-periode berikutnya. Selain

¹⁴⁸ Anik Karomah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 5 Mei 2023.

itu, dengan pengukuran kinerja ini bisa mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Kemudian wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller*

1 KSPPS BMT NU Lumajang yang mengungkapkan bahwa:¹⁴⁹

Saat RAT pertama BMT tahun buku 2021 itu kami memberikan *reward* kepada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang atas kepercayaannya untuk menabung dalam jumlah besar di KSPPS BMT NU Lumajang. *Reward* berupa satu unit motor vario yang diberikan oleh BMT.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem *reward* sudah diterapkan sejak awal berdirinya KSPPS BMT NU Lumajang. Seperti pemberian *reward* kepada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang atas kepercayaannya untuk menabung di KSPPS BMT NU Lumajang dalam jumlah besar. *Reward* yang diberikan oleh KSPPS BMT NU Lumajang ini berupa satu unit motor vario.

Pada KSPPS BMT NU Lumajang juga sudah diterapkan sistem *reward* sehingga memotivasi baik karyawan atau penabung agar semakin semangat dalam menjalankan tugas masing-masing. Motivasi ini sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan atau pun visi misi organisasi. Dengan motivasi ini memudahkan pencapaian target organisasi. Selain itu, dengan adanya sistem pemberian

¹⁴⁹ Muhabbah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 6 Mei 2023.

reward dapat menarik minat masyarakat untuk berlomba-lomba dalam pemanfaatan produk-produk yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang.

Setelah itu, peneliti wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki selaku *Teller 2* KSPPS BMT NU Lumajang:¹⁵⁰

“RAT tahun buku 2022 kemarin ini ada pemberian *reward* kepada KSPPS BMT NU Lumajang cabang Pasirian karena bisa melebihi target yang sudah ditetapkan. *Reward* yang diberikan berupa nominal uang.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada RAT tahun 2022 ada pemberian *reward* kepada KSPPS BMT NU Lumajang cabang Pasirian karena bisa melebihi target yang sudah ditetapkan. *Reward* yang diberikan ini berupa nominal uang.

Kemudian dilanjutkan peneliti wawancara dengan Bapak Abdul Gofar selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹⁵¹

“Karyawan disini disiplin untuk jam masuk kerja. Jam buka kantor kan jam 08:00, benar-benar jam 08:00 semua karyawan sudah ada di kantor.”

Setelah itu, peneliti mewawancarai Ibu Riska selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹⁵²

“Karyawan disini disiplin mbak, selain itu juga ramah-ramah dan cekatan dalam menjalankan tugasnya.”

Lalu, dilanjutkan dengan mewawancarai Ibu Lasmi selaku nasabah KSPPS BMT NU Lumajang:¹⁵³

¹⁵⁰ Ahmad Muzakki, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 7 Mei 2023.

¹⁵¹ Abdul Gofar, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023.

¹⁵² Riska, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023.

¹⁵³ Lasmi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 11 Oktober 2023.

Jam buka kantor BMT ini selalu tepat waktu mbak, setiap saya kesini saat jam buka memang buka. Jadi karyawan-karyawannya disiplin sekali.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang disiplin dilihat dari ketepatan jam buka kantor.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) BMT NU Lumajang sudah diterapkan dengan baik. Dilihat dari pencatatan keuangan yang sudah menggunakan sistem meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan yang sudah menggunakan sistem ini mengacu pada laporan keuangan KSPPS BMT NU Jombang. Di akhir bulan *teller* bertanggungjawab untuk mengecek pengeluaran dan pendapatan KSPPS BMT NU Lumajang yang berpengaruh pada neraca dan laba rugi bulanan. Setiap lembaga keuangan memiliki laporan keuangan yang berbeda, tak terkecuali KSPPS BMT NU Lumajang yang memiliki laporan keuangan versi BMT. Namun, apabila dari Dinas Koperasi meminta laporan keuangan dengan format yang berbeda maka KSPPS BMT NU Lumajang akan membuat laporan keuangan sesuai dengan permintaan tersebut. Laporan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang sudah sesuai dengan prinsip syariah karena

mengacu pada laporan keuangan KSPPS BMT NU Jombang yang sudah dinyatakan sehat laporan keuangannya.

Tujuan dari penerapan prinsip akuntabilitas KSPPS BMT NU Lumajang yakni supaya mendapat kepercayaan dan menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh publik. Selain itu, akuntabilitas juga sebagai bahan evaluasi bagi KSPPS BMT NU Lumajang mengenai kualitas pelayanan di KSPPS BMT NU Lumajang dan untuk mempertanggungjawabkan kinerja karyawan selama satu periode. Dari akuntabilitas ini bermanfaat pada terciptanya transparansi organisasi, meningkatkan kepercayaan publik dan lebih responsif terhadap saran dan kritik yang diberikan oleh publik.

Penerapan akuntabilitas ini sudah memenuhi indikator-indikator penerapan akuntabilitas. Perincian tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian sudah tersedia dalam SOP karyawan. Pada rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, pengurus ataupun pimpinan selalu mengingatkan mengenai *jobdesk* masing-masing bagian agar tidak menyimpang dari SOP yang ada. Perekrutan karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang melalui beberapa seleksi, seperti tes tulis, wawancara dan lain sebagainya. Seleksi ini juga diikuti oleh puluhan pendaftar sehingga bisa dipastikan antara kompetensi dengan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada masing-masing bagian

sudah sesuai. Di KSPPS BMT NU Lumajang juga menerapkan sistem *reward* untuk karyawan-karyawan yang sudah memenuhi target atau bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan adalah gagasan peneliti dari keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan.

1. Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS BMT NU Lumajang

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang, pengelolaan yang diterapkan di KSPPS BMT NU Lumajang terdapat empat tahap yang terdiri dari:

Tabel 4.1 Tahapan-Tahapan Pengelolaan

Tahapan Perencanaan	Pelaksanaan
Perencanaan	KSPPS BMT NU Lumajang merancang dan menyusun perencanaan kinerjanya untuk satu periode yang disajikan dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).
Pengorganisasian	Tiap-tiap bagian struktur organisasi KSPPS BMT NU Lumajang melakukan koordinasi agar tidak terjadi mis komunikasi seperti pada penangan pembiayaan bermasalah.
Pelaksanaan	Operasional KSPPS BMT NU Lumajang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama yang telah tersaji dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).
Pengawasan	KSPPS BMT NU Lumajang diawasi oleh dua pengawas, yaitu pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal dilakukan oleh pengurus

Tahapan Perencanaan	Pelaksanaan
	KSPPS BMT NU Lumajang dan pengawas dari KSPPS BMT NU Jombang, sedangkan pengawas eksternal dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang.

Sumber: diolah oleh penulls

George R Terry mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain.¹⁵⁴

KSPPS BMT NU Lumajang ini masih termasuk koperasi baru karena baru menjalankan dua kali Rapat Anggota Tahunan (RAT). Meskipun begitu, pengelolaan yang baik menjadikan perkembangan KSPPS BMT NU Lumajang diakui oleh publik. Baru-baru ini dalam acara PWNNU Jawa Timur Award tahun 2023 kategori BMT, KSPPS BMT NU Lumajang menjadi juara pertama. Penghargaan yang diraih oleh KSPPS BMT NU Lumajang ini membuktikan bahwa pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang tidak perlu diragukan lagi.

Pada pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang terdapat rangkap jabatan. Rangkap jabatan di sini terjadi pada bagian *Customer Service (CS)*. Tidak jarang *Customer Service (CS)* berperan sebagai petugas *funding* yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari nasabah dan memberikan informasi-informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang.

¹⁵⁴ Sadikin, Isra Misra & Muhammad Sholeh Hudin, *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, 2.

Sehingga tidak sesuai dengan hasil penelitian Nining Supianti dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur” yang menerangkan bahwa dengan penerapan *Good Corporate Governance*, karyawan dituntut untuk menjalankan segala tugas atau kewajiban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.¹⁵⁵

Berdasarkan teori dari George R. Terry dengan fakta di lapangan di atas maka dapat dikatakan bahwa KSPPS BMT NU Lumajang telah menerapkan prinsip transparansi, namun berdasarkan kutipan Nining Supianti dengan fakta dilapangan tidak sesuai karena pada temuan peneliti pada KSPPS BMT NU Lumajang masih terjadi rangkap jabatan pada pengelolaannya.

2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT NU Lumajang, terdapat beberapa karakteristik transparansi seperti di bawah ini:

Tabel 4.2 Karakteristik-Karakteristik Transparansi

Karakteristik Transparansi	Pelaksanaan
Informatif (<i>Informativennes</i>)	Bagian pelayanan bertanggungjawab untuk mengupdate informasi di akhir jam kerja kepada pengawas internal.

¹⁵⁵ Supianti, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur” (Skripsi, UIN Mataram, 2022), 51.

Karakteristik Transparansi	Pelaksanaan
Keterbukaan (<i>Openness</i>)	KSPPS BMT NU Lumajang memberikan informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan aktifitas yang terjadi melalui pelayanan langsung di kantor KSPPS BMT NU Lumajang.
Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	KSPPS BMT NU Lumajang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangannya.

Sumber: diolah oleh penulis

Dalam sebuah organisasi keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib untuk diterapkan. Karena dengan transparansi dapat meminimalisir terjadinya fraud. Berikut ini indikator-indikator penerapan transparansi di KSPPS BMT NU Lumajang:

Tabel 4.3 Indikator-Indikator Penerapan Transparansi

Indikator Transparansi	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Kemudahan mengakses informasi	✓	
Ketersediaan informasi	✓	
Kerahasiaan informasi	✓	

Sumber: diolah oleh penulis

Dari beberapa karakteristik dan indikator di atas terlihat bahwa penerapan transparansi sudah terlaksana. Mardiasmo mengemukakan bahwa transparansi ialah keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan yang dapat diketahui dan diawasi oleh bagian pengawasan dan publik. Kemudian dilanjutkan oleh Tjokromidjoyo yang menjelaskan

bahwa transparansi artinya dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai perumusan kebijakan organisasi.¹⁵⁶

Dari definisi di atas dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya tentang kemudahan dalam mendapatkan informasi saja, namun juga mengenai keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan pada sebuah organisasi atau badan usaha. Informasi-informasi yang ada pada sebuah organisasi harus transparan atau terbuka kepada semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal.

Namun, pada penerapan transparansi KSPPS BMT NU Lumajang masih belum memiliki *website* khusus untuk mengupdate informasi tentang KSPPS BMT NU Lumajang ke badan publik. Selain itu, belum maksimalnya pemanfaatan media sosial sebagai media keterbukaan informasi. Sebenarnya dengan adanya *website* khusus dan maksimalnya pemanfaatan media sosial yang ada akan lebih memudahkan publik dalam mengakses informasi. Di era sekarang semua sudah sudah internet dan dengan pemanfaatan internet ini informasi mengenai KSPPS BMT NU Lumajang akan tersebar luaskan dengan mudah.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pada KSPPS BMT NU Lumajang sudah menerapkan prinsip transparansi yang terlihat pada transparansi kepada pengurus. Transparansi kepada pengurus ini berkaitan dengan laporan harian keuangan yang dilakukan oleh bagian pelayanan (*teller*) di akhir jam kerja.

¹⁵⁶ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, 163.

Sejalan dengan hasil penelitian dari Imroatus Soliha yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo” yang menjelaskan bahwa dalam menerapkan prinsip transparansi KSPPS BMT Salafiyah menyediakan *website*, layanan tatap muka di jam kerja, menyediakan pamflet dan brosur, penyampaian informasi melalui petugas *fundng* serta menjaga dengan teguh apa yang menjadi rahasia perusahaan. Karena dengan penerapan transparansi ini dapat menjaga objektivitas dalam menjalankan program pada perusahaan atau organisasi.¹⁵⁷

Berdasarkan teori dari Mardiasmo dan kutipan dari penelitian Imroatus Soliha dengan fakta di lapangan di atas maka dapat dikatakan bahwa KSPPS BMT NU Lumajang telah menerapkan prinsip transparansi yang bisa terlihat dari adanya transparansi kepada pengurus mengenai laporan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang dan belum tersedianya *website* khusus serta kurangnya pemanfaatan sosial media yang dimiliki.

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang

Selain transparansi, akuntabilitas juga sudah diterapkan di KSPPS BMT NU Lumajang. Sebuah pertanggungjawaban karyawan terhadap tugas dan tanggungjawab yang sudah diamanahkan. Pertanggungjawaban ini biasanya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan diakhir periode. Pertanggungjawaban di sini berupa laporan keuangan yang berisi

¹⁵⁷ Imroatus Soliha, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo,” *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 15, no. 1 (Juni, 2021): 171-172.

mengenai aktifitas dan kinerja keuangan KSPPS BMT NU Lumajang mengenai pemasukan atau pengeluaran KSPPS BMT NU Lumajang.

Berikut karakteristik-karakteristik akuntabilitas, meliputi:

Tabel 4.4 Karakteristik Akuntabilitas

Karakteristik Akuntabilitas	Pelaksanaan
Integritas keuangan	Laporan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang sudah menggunakan sistem dalam pencatatan keuangannya.
Pengungkapan	KSPPS BMT NU Lumajang melakukan pengungkapan informasi secara rutin dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan rapat evaluasi kerja.
Ketaatan	Pencatatan laporan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang mengacu pada laporan keuangan KSPPS BMT NU Lumajang yang sudah dinyatakan sehat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sumber: diolah oleh penulis

Selain karakteristik-karakteristik yang telah dijelaskan di atas, berikut ini indikator-indikator penerapan akuntabilitas, meliputi:

Tabel 4.5 Indikator-Indikator Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Perincian tugas dan tanggungjawab	✓	
Kompetensi yang sesuai	✓	
Pengukuran kinerja	✓	

Sumber: diolah oleh penulis

Dari tabel karakteristik dan indikator penerapan transparansi di atas, KSPPS BMT NU Lumajang sudah melaksanakan prinsip

akuntabilitas. Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁵⁸ Maksud dari teori tersebut ialah pihak-pihak pemegang amanah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang terjadi di sebuah organisasi kepada pihak pemberi amanah.

Pertanggungjawaban karyawan atas kinerjanya biasanya dilakukan dengan pengungkapan laporan keuangan ke publik melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dengan pengungkapan tersebut membuktikan bahwa karyawan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP). Namun, pada KSPPS BMT NU Lumajang ini laporan keuangan atau laporan pertanggungjawabannya belum pernah di audit.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, prinsip akuntabilitas sudah diterapkan di KSPPS BMT NU Lumajang yang terlihat pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan rutin setiap tahunnya. Selain itu, pelaksanaan rapat evaluasi kerja yang melibatkan semua anggota KSPPS BMT NU Lumajang dan pengawas internal yang dilakukan per triwulan.

¹⁵⁸ Edowai, Herminawaty Abubakar & Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 16-17.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sevi Rahmawati pada penelitiannya yang berjudul “Analisis Good Corporate Governance pada Koperasi Mina Pananjung Lestari” yang menerangkan bahwa koperasi dikatakan akuntabel apabila terdapat kejelasan aturan, fungsi, mekanisme kinerja serta kejelasan job deskripsi. Koperasi juga wajib mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerja koperasi tersebut.¹⁵⁹

Berdasarkan teori dari Mardiasmo dan kutipan dari penelitian Sevi Rahmawati dengan fakta di lapangan di atas maka dapat dikatakan bahwa KSPPS BMT NU Lumajang telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang bisa terlihat dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang rutin dilaksanakan di akhir periode.



¹⁵⁹ Sevi Rahmawati, “Analisis Good Corporate Governance pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran” (Skripsi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022), 24.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang ini melalui beberapa tahapan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adanya penghargaan yang diberikan oleh PWNU Jawa Timur dalam kategori BMT juga membuktikan bahwa pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang sudah diakui oleh publik. Namun, masih terjadi rangkap jabatan di KSPPS BMT NU Lumajang pada bagian *customer service (cs)* yang merangkap menjadi *funding officer (fo)*.
2. Dilihat dari indikator penerapan prinsip transparansi, KSPPS BMT NU Lumajang sudah baik. Dibuktikan dari kemudahan dalam mengakses informasi, KSPPS BMT NU Lumajang memberikan pelayanan melalui tatap muka dan bagian *funding officer (fo)*, ketersediaan informasinya melalui sosialisasi di masyarakat, tersedianya brosur serta pamflet di kantor KSPPS BMT NU Lumajang, dan kerahasiaan informasi KSPPS BMT NU Lumajang seperti laporan keuangan tidak mudah untuk diakses oleh publik. Namun, pada penerapan prinsip transparansi KSPPS BMT NU Lumajang belum maksimal karena KSPPS BMT NU Lumajang belum memiliki *website* khusus dan pemanfaatan media sosial yang kurang.

3. Penerapan prinsip akuntabilitas pada KSPPS BMT NU Lumajang sudah terlaksana, terlihat pada kompetensi yang dimiliki karyawan-karyawan KSPPS BMT NU Lumajang yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan, dan adanya penerapan sistem *reward* bagi karyawan-karyawan yang sudah memenuhi target dengan tujuan untuk memotivasi karyawan, pengungkapan laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban yang diungkapkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) membuktikan bahwa karyawan-karyawan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Namun, laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban yang dimiliki KSPPS BMT NU Lumajang belum bisa dipertanggungjawabkan kewajarannya karena belum pernah di audit.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.

1. KSPPS BMT NU Lumajang mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan *job description* masing-masing jabatan agar tidak menimbulkan rangkap jabatan dalam pengelolaan koperasi.
2. KSPPS BMT NU Lumajang menyediakan *website* khusus agar memudahkan publik dalam mengakses informasi dan meningkatkan pemanfaatan sosial media yang sudah ada.
3. KSPPS BMT NU Lumajang rutin melakukan audit pada laporan keuangan atau laporan pertanggungjawabannya agar laporan keuangan yang diungkapkan ke publik informasi keuangan yang lebih baik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Ahmad Hijri dan Diyah Sekar Arum. "Akuntabilitas sebagai penerapan Good Corporate Governance yang Mengurangi Potensi Kecurangan pada Koperasi Syariah." *Jurnal Stie Semarang* 15, no. 2 (Juni, 2023): 178-189.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 2010.
- Edowai, Mikael, Herminawaty Abubakar & Miah Said. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida, 2021.
- Firmansyah, M. Anang & Budi W. Mahardhika. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Hasmawati, Fifi. *Manajemen Koperasi*. Sumatera Utara: Duta Azhar, 2013.
- Heryadi, Deny & Mifta Huda. *Buku Panduan Koperasi Syariah*. Jakarta: PT.BSIN, 2021.
- IAIN Jember, Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAN Jember Pers, 2019.
- Ibrahim, Idris Abbas. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Cirebon." *Jurnal of Law* 1, no. 2 (2021): 56-62.
- Mais, Rimi Gusliana dan Lini Palindri. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi dan Governance* 1, no. 1 (Juli, 2020): 57-66.
- Moerrin, Dimas Aufa & Hero Priono. "Pengaruh Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pegawai." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 11 (Juni 2022): 57-68.
- Muslimah, Siti. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Nasution, Juliana dkk. "Analisis Tingkat Penerapan Good Corporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2022): 841-850.

- Nining, Supianti. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur." Skripsi, UIN Mataram, 2022.
- Nurwulandari, Fitri, Indah Ismawati dan Mohamad Djasuli. "Prinsip Akuntabilitas pada Corporate dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis* 2, no. 3 (November, 2022): 609-61.
- Permatasari, Elisa. "Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan pada Koperasi Syariah." Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Purwantini, Kasih. *Akuntansi Koperasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rahmawati, Sevi. "Analisis Good Cooperative Governance pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran." Skripsi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.
- Rahmayani, Melia Wida & Engkun Kurnadi. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten)," *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2022): 703-713.
- Rohman, Achmad Toyyibur. "Penerapan Marketing Mix dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah BMT Nuansa Umat (NU) Jawa Timur Randuagung Kabupaten Lumajang." Tesis, IAIN Jember, 2020.
- Ramadhani, Sinta Bela. "Good Governance Proverty Alleviation melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro (Studi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Sadikin, Ali, Isra Misra & Muhammad Sholeh Hudin. *Pengantar manajemen dan bisnis*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Salim & Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sekretariat Negara RI. Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Sekretariat Negara RI. Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sekretariat Negara RI. Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Sholiha, Imroatus. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo." *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2021): 161-180.

Soraya, Rezki Astuti. "Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 1 (Januari, 2022): 1-6.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukmayadi. *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*. Bandung: ALFABETA, 2020.

Sumantri, Bambang Agus & Erwin Putera Permana. *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan, Teori dan Praktek*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.

Usnan. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah)." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 5, no. 1 (2019): 83-95.

Wibisono, Yusuf. "Penerapan Manajemen Resiko pada Pengelolaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)." *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage* 3, no. 2 (2019): 119-127.

Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI, 2019.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anik Nuzulur Rohmah

NIM : E20193117

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 4 September 2023

Saya yang menyatakan



Anik Nuzulur Rohmah

NIM. E20193117

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Sub variabel	Indikator Penelitian	Sumber Data Penelitian	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> Prinsip Transparansi Prinsip Akuntabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> Prinsip Transparansi Prinsip Akuntabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> Informatif (Informativene ss) Keterbukaan (Openness) Pengungkapan (Disclosure) Integritas keuangan Pengungkapan Ketaatan 	<ol style="list-style-type: none"> Informan: <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan Karyawan Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian kualitatif Jenis penelitian lapangan Lokasi Penelitian KSPPS BMT NU Lumajang Subyek Penelitian: Purposive Teknik Pengumpulan 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Lumajang? Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU

	3. Pengelolaan	3. Pengeloaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Planning (perencanaan) b. Organizing (pengorganisa sian) c. Actuating (Pelaksanaan) d. Controlling (pengawasan) 		<p>data</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi <p>6. Analisis data deskriptif</p> <p>7. Keabsahan data triangulasi sumber</p>	<p>Lumajang?</p> <p>3. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Lumajang?</p>
	4. KSPPS	4. KSPPS	<ul style="list-style-type: none"> a. Simpanan (tabungan) b. Pembiayaan (pinjaman) 			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-745 /Un.22/7.a/PP.00.3/4/2023 13 April 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala KSPPS BMT NU Lumajang
Jl. Alun-alun Timur No. 3, Jogotrunan, Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Anik Nuzulur Rohmah
NIM : E20193117
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang di Jogotrunan di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dekan
Dekan Bidang Akademik,
[Signature]
Nida Widyawati Islami Rahayu



KSPSS “BMT NAHDLATUL ULAMA’ LUMAJANG”

Nomor Badan Hukum : AHU – 0008492.AH.01.26 TH. 2021 Tgl 02 Februari 2021
Jl. Alun-alun Timur No. 3 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Jogotrunan
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
Telp. 0813-1316-6177



SURAT SELESAI PENELITIAN

No : 008/BMT.NU-LMJ/01/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAUZI ANWAR

Jabatan : Manager

Instansi : KSPSS BMT Nahdlatul Ulama’ Lumajang

Menerangkan bahwa,

Nama : Anik Nuzulur Rohmah

NIM : E20193117

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Sidiq (UIN KHAS) Jember

Semester : VIII (Delapan)

UIN KHAS JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Telah benar-benar melakukan penelitian di KSPSS BMT Nahdlatul Ulama’ Lumajang untuk menyusun tugas akhir dengan judul “ Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPSS) BMT Nahdlatul Ulama’ Lumajang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 06 Juni 2023
Manajer BMT NU Lumajang


BMT NU LUMAJANG
Fauzi Anwar

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengelolaan KSPPS BMT NU Lumajang

a. Produk Simpanan

- 1) Bagaimana sistem perencanaan pada produk simpanan di KSPPS BMT NU Lumajang?
- 2) Bagaimana sistem pengorganisasian pada produk simpanan di KSPPS BMT NU Lumajang?
- 3) Bagaimana sistem pelaksanaan pada produk simpanan di KSPPS BMT NU Lumajang?
- 4) Bagaimana sistem pengawasan pada produk simpanan di KSPPS BMT NU Lumajang?

b. Produk Pembiayaan

- 1) Bagaimana sistem perencanaan pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Lumajang?
- 2) Bagaimana sistem pengorganisasian pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Lumajang?
- 3) Bagaimana sistem pelaksanaan pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Lumajang?
- 4) Bagaimana sistem pengawasan pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Lumajang?

2. Penerapan Prinsip Transparansi KSPPS BMT NU Lumajang

a. Produk Simpanan

- 1) Bagaimana penyampaian informasi produk simpanan KSPPS BMT NU Lumajang kepada stakeholder?
- 2) Bagaimana keterbukaan informasi produk simpanan KSPPS BMT NU Lumajang?
- 3) Bagaimana pengungkapan informasi mengenai aktifitas dan kinerja produk simpanan KSPPS BMT NU Lumajang?

b. Produk Pembiayaan

- 1) Bagaimana penyampaian informasi produk pembiayaan KSPPS BMT NU Lumajang kepada stakeholder?
- 2) Bagaimana keterbukaan informasi produk pembiayaan KSPPS BMT NU Lumajang?
- 3) Bagaimana pengungkapan informasi mengenai aktifitas dan kinerja produk pembiayaan KSPPS BMT NU Lumajang?

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas KSPPS BMT NU Lumajang

a. Produk Simpanan






- 1) Bagaimana bentuk integritas keuangan pada produk simpanan KSPPS BMT NU Lumajang?
- 2) Bagaimana pengungkapan aktivitas keuangan produk simpanan KSPPS BMT NU Lumajang?
- 3) Bagaimana bentuk ketaatan dalam proses pencatatan keuangan produk simpanan KSPPS BMT NU Lumajang?

b. Produk Pembiayaan

- 1) Bagaimana bentuk integritas keuangan pada produk pembiayaan KSPPS BMT NU Lumajang?
- 2) Bagaimana pengungkapan aktivitas keuangan produk pembiayaan KSPPS BMT NU Lumajang?
- 3) Bagaimana bentuk ketaatan dalam proses pencatatan keuangan produk pembiayaan KSPPS BMT NU Lumajang?

JURNAL PENELITIAN

Judul: Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	04 Mei 2023	Mengajukan permohonan tempat izin penelitian dengan menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada pengelola KSPPS BMT NU Lumajang	
2.	05 Mei 2023	Wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang	
3.	06 Mei 2023	Wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku Teller 1 KSPPS BMT NU Lumajang	
4.	07 Mei 2023	Wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakki selaku Teller 2 KSPPS BMT NU Lumajang	
5.	08 Mei 2023	Membantu proses pencatatan transaksi simpanan dan pembiayaan di KSPPS BMT NU Lumajang	

Lumajang, 05 Mei 2023

Pimpinan KSPPS BMT NU Lumajang



Anik Karomah, S.E

DOKUMENTASI PENELITIAN



Observasi tempat penelitian



Wawancara dengan Ibu Anik Karomah selaku pimpinan KSPPS BMT NU
Lumajang



Wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller 1* KSPPS BMT NU Lumajang



Wawancara dengan Ibu Muhabbah selaku *Teller 1* KSPPS BMT NU Lumajang

BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Anik Nuzulur Rohmah
NIM : E20193117
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 05 Januari 2001
Alamat : Dusun Timur Sawah RT/RW 002/009 Desa
Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten
Lumajang
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Email : aniknzlr2@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Miftahul Ulum Pandanwangi Tahun 2005 - 2007
2. SDN Pandanwangi 04 Tahun 2007 - 2013
3. SMPN 1 Tempeh Tahun 2013 - 2016
4. SMAN 1 Tempeh Tahun 2016 - 2019
5. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2019 - 2023